

**STUDI EKSPLORASI PROGRAM DANA PENGUATAN MODAL
PADA PELAKU USAHA PEREMPUAN
DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



**Disusun Oleh:
Nur Fuad Zakiyatul Azizah
10404241012**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI

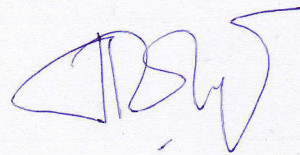
**STUDI EKSPLORASI PROGRAM DANA PENGUATAN MODAL
PADA PELAKU USAHA PEREMPUAN
DI KABUPATEN SLEMAN**

Disusun Oleh:
Nur Fuad Zakiyatul Azizah
NIM. 10404241012

Telah disetujui Dosen Pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan di depan
TIM Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Pembimbing



Daru Wahyuni, M.Si

NIP. 19681109 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

STUDI EKSPLORASI PROGRAM DANA PENGUATAN MODAL PADA PELAKU USAHA PEREMPUAN DI KABUPATEN SLEMAN

Disusun Oleh:

Nur Fuad Zakiyatul Azizah

NIM. 10404241012

Telah dipertahankan di depan TIM Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal. 29 Januari 2015.

Tim Penguji

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Supriyanto, M.M	Ketua Penguji		11 Februari 2015
Daru Wahyuni, M.Si	Sekretaris Penguji		11 Februari 2015
Losina Purnastusti, Ph.D	Penguji Utama		5 Februari 2015

Yogyakarta, 12 Februari 2015

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Fuad Zakiyatul Azizah

NIM : 10404241012

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Judul Skripsi : Studi Eksplorasi Program Dana Penguatan Modal pada Pelaku Usaha Perempuan di Kabupaten Sleman

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan oleh orang lain, kecuali pada bagian tertentu saya ambil sebagai acuan. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, Januari 2015

Penulis



Nur Fuad Zakiyatul Azizah

NIM. 10404241012

MOTTO

“Life is better to burn out than fade away.”

(Kurt Cobain)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 5-8)

*“In Life , one usually commit 2 type off mistakes. The first is to nnot even begin;
the second is to noy see it till the end”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ditulis sebagai persembahan untuk:

Alm. Bapak dan Mama.

Adik-adikku, Lubab, Dliyah, Ni'mah, dan Wahab, serta seluruh anggota keluarga besar Alm. H. Nur M. Dasuki dan Alm M. Hannan, yang tanpa keberadaan mereka saya tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk para sahabat sebagai rasa terima kasih untuk kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Terutama untuk Almamater Universitas Negeri Yogyakarta dan Negara Indonesia.

Semoga karya kecil ini dapat menjadi sumbangsih dan menjadi manfaat.

STUDI EKSPLORASI PROGRAM DANA PENGUATAN MODAL PADA PELAKU USAHA PEREMPUAN DI KABUPATEN SLEMAN

Oleh:

Nur Fuad Zakiyatul Azizah

NIM. 10404241012

ABSTRAK

Keberadaan usaha kecil, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak utamanya dukungan dari sisi modal. Bagi perempuan anggota UPPKS/UP2K adanya program Dana Penguatan Modal (DPM) membuka kesempatan untuk bisa memulai usaha ataupun mengembangkan usaha yang telah dimiliki. Melalui penelitian ini, dieksplorasi manfaat DPM, permasalahan atau kendala yang dihadapi, serta peran anggota UPPKS dan UP2K Kabupaten Sleman penerima DPM.

Penelitian ini menggunakan data primer dari angket dan wawancara dilengkapi data sekunder berupa data karakteristik Kabupaten Sleman, penyaluran DPM dan data kelompok UPPKS dan UP2K penerima bantuan DPM dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Dari hasil Penelitian ditemukan bahwa penerima DPM merasakan manfaat pada kemajuan usaha dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Manfaat yang dirasakan tercermin dari peningkatan modal usaha sebesar 169,59%, peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 41,38%, peningkatan pendapatan sebesar 115%, peningkatan asset yang dimiliki sebesar 80%, serta peningkatan tabungan sebesar 164%. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan yang dialami penerima DPM adalah sebesar 113,99%. Disamping manfaat yang dirasakan ada beberapa kesulitan atau kendala yang dihadapi yakni kesulitan dalam penyusunan proposal pengajuan dana pinjaman, jumlah DPM yang masih kurang mencukupi, pengetahuan manajerial dan pengelolaan keuangan yang minim, serta keberadaan anggota yang terlambat mengangsur menghambat angsuran kelompok ke KP3M. Sebagai individu, perempuan pelaku usaha di Kabupaten Sleman memiliki multi peran, penerima DPM berkontribusi dan bertanggung jawab dalam keluarga, usaha, dan kelompok.

Kata kunci: DPM, UPPKS/UP2K, peran pelaku usaha perempuan

AN EXPLORATORY STUDY OF THE CAPITAL STRENGTHENING FUND PROGRAM FOR FEMALE BUSINESS PRACTITIONERS IN SLEMAN REGENCY

ABSTRACT

The existence of small-scale businesses needs support from several parties, especially capital support. For women who are members of UPPKS/UP2K, the Capital Strengthening Fund (CSF) program provides opportunities for them to start businesses or develop ones they have already run. This study explores benefits of CSF, problems and constraints, and roles of members of UPPKS/UP2K receiving CSF in Sleman Regency.

The study employed primary data collected through a questionnaire and interviews, supplemented by secondary data, namely data on characteristics of Sleman Regency and distribution of CSF, and data on groups of UPPKS/UP2K receiving SCF assistance from the local government of Sleman Regency.

The results of the study show that those receiving CSF get benefits in the form of business improvement and family prosperity improvement. The benefits are reflected in the business capital improvement by 169.59%, the number of employee improvement by 41.38%, the income improvement by 115%, the asset improvement by 80%, and the savings improvement by 164%. On the whole the average improvement that those receiving CSF experience is 113.99%. In addition to benefits, there are problems or constraints that they encounter, namely difficulties in designing proposals to obtain loans, the insufficient amount of CSF, limited managerial knowledge and financial management, and some members who pay the group instalments late to KP3M. As individuals, female business practitioners in Sleman Regency have multiple roles, as those receiving CSF who contribute to and are responsible for families, business, and groups.

Keywords: CSF, UPPKS/UP2K, female business practitioners's role

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Studi Eksplorasi Program Dana Penguatan Modal pada Pelaku Usaha Perempuan di Kabupaten Sleman)” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meraih gelar Sarjana Pendidikan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, petunjuk dan sebagainya dari berbagai pihak, untuk itu tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah menyediakan sarana dan fasilitas perkuliahan yang baik.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis menggunakan fasilitas selama kuliah sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Daru wahyuni, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi sekaligus sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Losina Purnastuti, Ph.D selaku narasumber dan penguji utama yang telah memberikan masukan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Supriyanto, M.M selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan arahan kepada penulis.

6. Semua dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti dan ilmu yang penulis terima akan penulis pergunakan dengan sebaik-baiknya.
7. Bapak Ibu/orang tua, keluarga penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik dari segi materiil maupun moril.
8. Teman-teman pendidikan ekonomi angkatan 2010 yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta doanya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta,

Penulis



Nur Fuad Zakiyatul A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II. KAJIAN TEORI	16
A. Deskripsi Teori	16
1. Pembangunan Ekonomi	16
2. Kemiskinan	19
3. Pemberdayaan Masyarakat	20
4. Pemberdayaan Perempuan	22
5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	24
6. Investasi	28
7. Modal Usaha	29
8. Pinjaman (Kredit)	30

9. Penguatan Modal	30
10. Dana Penguatan Modal	31
B. Penelitian yang Relevan	34
C. Kerangka Berpikir	36
BAB III. METODE PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Variabel Penelitian	40
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	40
E. Populasi dan Sampel Penelitian	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Instrumen Penelitian	45
H. Teknik Analisis Data	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan Penelitian	83
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan Penelitian	94
B. Keterbatasan Penelitian	95
C. Saran Penelitian	95
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pinjaman dan Tunggakan Dana Penguatan Modal Kabupaten Sleman.....	8
2. Data Pinjaman dan Tunggakan Dana Penguatan Modal Badan KB, PP, dan PM per 30 Desember 2013.....	9
3. Plafon dan Realisasi Penyaluran DPM Badan KB, PP, dan PM Semester II Tahun 2013.....	10
4. Pengembangan Instrumen Penelitian.....	46
5. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	47
6. Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2009-2013.....	50
7. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
8. Responden Berdasarkan Status Perkawinan.....	52
9. Responden Berdasarkan Kelompok Umur.....	52
10. Responden Berdasarkan Bidang Usaha.....	53
11. Responden Berdasarkan Tahun Berdirinya Usaha.....	54
12. Responden Berdasarkan Jumlah Anggota.....	54
13. Responden Berdasarkan Jumlah Pinjaman yang Diterima.....	55
14. Pengalokasian Penggunaan DPM.....	60
15. Perubahan dan Pertumbuhan Modal Usaha Penerima DPM.....	62
16. Perubahan dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Penerima DPM.....	64
17. Perubahan dan Pertumbuhan Pendapatan Penerima DPM.....	65
18. Perubahan dan Pertumbuhan Asset Penerima DPM.....	66
19. Perubahan dan Pertumbuhan Tabungan Penerima DPM.....	67
20. Perkembangan Usaha Penerima DPM.....	68

21. Persepsi Sumber Informasi DPM.....	70
22. Data angsuran DPM.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berfikir	38
2. Persepsi manfaat DPM.....	56
3. Persepsi Manfaat DPM dalam Perkembangan Usaha.....	57
4. Persepsi Manfaat DPM dalam Perkembangan Kesejahteraan Keluarga.....	58
5. Persepsi Ketercukupan Jumlah Dana.....	59
6. Persepsi Penyelewengan Pengguna DPM.....	61
7. Modal Usaha Sebelum dan Sesudah Menerima DPM.....	62
8. Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Menerima DPM.....	63
9. Pendapatan Sebelum dan Sesudah Menerima DPM.....	64
10. Asset Sebelum dan Sesudah Menerima DPM.....	66
11. Tabungan Sebelum dan Sesudah Menerima DPM.....	67
12. Persepsi Responden Terhadap Informasi Mengenai DPM.....	69
13. Persepsi Responden Terhadap Proses pengajuan DPM.....	71
14. Persepsi Responden Terhadap Jumlah Angsuran.....	74
15. Persepsi Rersponden Terhadap Besarnya Kontribusi.....	75
16. Persepsi Ketepatan Membayar Angsuran.....	76
17. Peran Responden dalam Ekonomi Keluarga.....	77
18. Peran Responden dalam Keluarga.....	79
19. Peran Responden sebagai Anggota Kelompok.....	81
20. Alokasi waktu Responden untuk Keluarga dan Kelompok.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar responden.....	103
3. Instrumen penelitian.....	105
4. Hasil Penelitian.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea ke-empat disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang dimaksud dalam hal ini salah satunya meliputi kesejahteraan di bidang ekonomi.

Kesejahteraan sering kali dikaitkan dengan kemiskinan. Untuk mencapai kesejahteraan, warga harus dijauhkan dari kemiskinan. Semakin rendah tingkat kemiskinan mengindikasikan kesejahteraan yang semakin baik. Artinya, kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus diselesaikan pemerintah guna menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan warga negaranya. Pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu terus digalakkan. Akan tetapi pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Masyarakat juga harus berperan serta dalam usaha mensejahterakan diri mereka. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan agar memiliki kesadaran untuk mandiri, menjadi sejahtera, dan terbebas dari kemiskinan.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai program pemberdayaan masyarakat pun disusun. Program tersebut mestinya melibatkan masyarakat, dengan cara pemerintah menggerakkan pendirian kelompok-kelompok usaha masyarakat

hingga di tingkat desa. Diantara kelompok-kelompok tersebut antara lain adalah pendirian gabungan kelompok usaha tani, kelompok-kelompok industri kecil, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Pemberdayaan masyarakat memiliki arti penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat perlu digerakkan mulai dari agen terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Dalam keluarga mencari nafkah memang merupakan kewajiban seorang suami atau ayah sebagai kepala keluarga, namun tidak menutup kemungkinan bagi istri atau ibu untuk turut berkontribusi dalam mencari nafkah bagi keluarga.

Perempuan kini semakin aktif, tidak hanya mengerjakan pekerjaan rumah dan merawat anggota keluarga. Kini perempuan telah banyak berpartisipasi dalam perekonomian, utamanya dalam perekonomian keluarga. Dewasa ini, perempuan yang bekerja bukan lagi menjadi hal yang tabu. Bahkan tidak jarang perempuan lebih sukses dalam kariernya dibandingkan laki-laki.

Di era emansipasi wanita seperti sekarang ini, kiprah perempuan semakin diakui. Perempuan tidak lagi identik dengan pendidikan rendah dan hanya mengurus rumah. Kini perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam pendidikan dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan karirnya tanpa terbatas, tentu saja tanpa melupakan kodrat aslinya sebagai perempuan. Disamping itu, keadaan ekonomi dimana biaya pendidikan, biaya kesehatan, bahkan biaya bahan makanan semakin mahal, juga memaksa perempuan untuk ikut berjuang membantu suami (bagi yang sudah berkeluarga)

untuk turut berkontribusi dalam pemasukan keluarga. Kondisi dimana biaya hidup semakin tinggi, keluarga yang hanya mengandalkan satu sumber penghasilan akan cenderung sulit bertahan terutama untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Kabupaten Sleman, melalui Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (Badan KB, PM, dan PP) pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain, pembinaan keluarga bagi keluarga yang memiliki balita dalam bentuk kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), pembinaan keluarga bagi keluarga yang memiliki anak remaja dalam bentuk kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR), melalui jalur sekolah dan non sekolah berupa kegiatan PIK-R (Pusat Informasi Konseling bagi Remaja), pembinaan keluarga bagi keluarga yang memiliki lansia dalam bentuk kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) dan kegiatan-kegiatan kewirausahaan bagi perempuan dan anggota masyarakat baik melalui UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), UP2K-PKK, SPP-UPK dan lain-lain. Melalui kelompok ini, perempuan menyatukan kreatifitas dan melakukan kegiatan produktif demi membantu perekonomian keluarga.

PKK atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah program lain yang merupakan bentuk dari pemberdayaan perempuan. PKK sendiri bertujuan untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. Beranggotakan ibu-ibu rumah tangga, PKK digerakkan oleh tim yang diketuai oleh isteri dari pimpinan daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah). Untuk Kabupaten Sleman, organisasi PKK juga berberbentuk UP2K-PKK. Jika

biasanya kegiatan dalam kelompok PKK berupa pelatihan keterampilan tambahan bagi para anggota, dalam kelompok UP2K-PKK juga dilakukan kegiatan simpan-pinjam seperti koperasi. Kelompok UP2K-PKK merupakan kelompok pra-Koperasi binaan Badan KB, PM dan PP. Akan tetapi, dana simpan-pinjam UP2K-PKK terbatas karena hanya terbatas dari anggota saja. Untuk dapat memenuhi kebutuhan anggota diperlukan tambahan dana dari pihak luar.

Kegiatan rutin UP2K-PKK ialah pemberian pelatihan ketrampilan kepada anggota. Pemberian pelatihan ketrampilan ini bertujuan memberikan peluang bagi anggota untuk dapat mengembangkan kreatifitas dan memulai usaha produktif. Selain itu, simpan-pinjam dalam kelompok UP2K-PKK berusaha memfasilitasi anggota dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal ini, uang. Melalui kelompok UP2K-PKK inilah para anggota mengusahakan peningkatan pendapatan keluarga.

Kelompok dibawah binaan Badan KB, PM dan PP kabupaten Sleman lainnya, yakni UPPKS. UPPKS beranggotakan kelompok KB wilayah tertentu. Mayoritas anggota UPPKS adalah ibu-ibu peserta KB, namun saat ini seiring dengan digalakkannya KB pria, terbentuk juga kelompok UPPKS yang beranggotakan bapak-bapak. Kegiatan rutin UPPKS ialah pertemuan rutin, yang biasanya diisi dengan kegiatan dari penyuluhan dari dinas KB, PM dan PP maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan Keluarga Berencana.

Masyarakat sendiri, beberapa memang telah memiliki kesadaran untuk berusaha. Baik secara individu maupun kelompok (untuk perempuan melalui kelompok UPPKS dan UP2K), mereka berupaya melakukan kegiatan produktif dengan harapan dapat mengangkat derajat hidup mereka. Sementara sebagian lain, memutuskan terus bergantung pada pemberi pekerjaan. Karena berbagai alasan mereka tidak mempunyai keberanian untuk memulai usaha sendiri.

Alasan sebagian masyarakat khususnya perempuan yang takut untuk memulai usaha salah satunya ialah keterbatasan modal. Sementara bagi sebagian masyarakat yang memiliki keberanian berusaha pun tak lantas terbebas dari permasalahan. Persaingan dunia usaha yang ketat, kemampuan yang terbatas dan permodalan yang jauh lebih kecil jika dibandingkan usaha-usaha besar yang menguasai pasar, membuat para perempuan kurang dapat bersaing sedangkan untuk mendapat akses tambahan modal dari bank atau lembaga keuangan formal lainnya tidaklah mudah. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

Dana Penguatan Modal (DPM) merupakan program yang dicanangkan secara nasional. Program ini dilaksanakan oleh hampir semua kementerian atau departemen pemerintahan di Indonesia meskipun masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda dalam penyalurannya. Sasaran penyaluran dana penguatan modal ini disesuaikan dengan bidang konsentrasi dari masing-masing kementerian atau departemen tersebut.

Sehubungan dengan pemberlakuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada Tahun 2001, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dengan kata lain pemerintah daerah menyanggah tanggung jawab penting untuk ikut serta berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Sleman juga memiliki program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Salah satu programnya adalah pemberian dana penguatan modal yang diperuntukkan bagi kelompok-kelompok usaha yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Dalam rangka menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat, iklim usaha dan meningkatkan perekonomian daerah, khususnya guna mendukung kelompok-kelompok usaha masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman meluncurkan program yang bertujuan mendukung pembiayaan bagi kelompok-kelompok usaha tersebut.

Dana penguatan modal (DPM) di Kabupaten Sleman merupakan dana bergulir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal (KP3M). Dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat dalam usahanya, terutama yang berkaitan dengan masalah modal. Bantuan dana ini diberikan kepada perorangan maupun kelompok usaha, di bidang pertanian, peternakan, industri, pariwisata dan lain sebagainya. Kelompok usaha yang menerima dana bergulir

ini diantaranya adalah UPPKS dan UP2K yang berada di bawah naungan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (Badan KB, PM dan PP).

Dana penguatan modal yang telah disalurkan KP3M Kabupaten Sleman hingga Desember 2013 telah mencapai 189.576.687.050,00 yang didistribusikan kepada perorangan atau kelompok di bawah koordinasi instansi-instansi terkait, meliputi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Badan KB, PM, dan PP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Pasar. Melalui instansi-instansi inilah dana penguatan didistribusikan kepada kelompok-kelompok usaha penerima dana penguatan modal. Dari total dana penguatan modal yang telah disalurkan di atas, sebanyak Rp41.000.092.681,00 atau 21,63% masih menjadi piutang yang beredar di masyarakat.

Secara lebih lengkap distribusi DPM di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pinjaman dan Tunggakan Dana Penguatan Modal Kabupaten Sleman Per 30 Desember 2013

No	Uraian	Pinjaman (Rp)	Tunggakan (Rp)	%
A	Dana Penguatan Modal yang disalurkan ke masyarakat			
1	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	126.166.928.050,00	20.116.472.900,00	15,94
2	Dinas Perindagkop.	36.034.000.000,00	9.090.303.500,00	25,23
3	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	8.448.750.000,00	2.635.284.681,00	31,19
4	Badan KB, PM dan PP	6.525.000.000,00	2.597.877.450,00	39,81
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.655.000.000,00	1.203.500.000,00	48,72
6	Dinas Pasar	1.647.000.000,00	1.106.247.500,00	67,17
Jumlah A		181.476.678.050,00	36.839.686.031,00	20,30
B	Piutang Khusus			
Jumlah B		8.100.000.000,00	4.160.406.650,00	51,36
Jumlah A+B		189.576.687.050,00	41.000.092.681,00	21,63

Sumber: Laporan DPM Kabupaten Sleman semester II tahun 2013

Dana tunggakan terbesar ada pada Dinas Pasar, yakni 67,17%. Sementara itu tunggakan terendah oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yakni 15,94%. Tunggakan dari Dinas KB, PM dan PP menempati urutan ke-3 terbesar di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan prosentase 39,81%.

Rincian dana tunggakan untuk Badan KB, PM dan PP dapat dilihat di tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data Pinjaman danTunggakan Dana Penguatan Modal Badan KB, PM dan PP Per 30 Desember 2013

No	Uraian	Pinjaman (Rp)	Tunggakan (Rp)	%
	Badan KB, PM dan PP	6.525.000.000,00	2.597.877.450,00	
1	UPPKS	6.235.000.000,00	2.499.897.450,00	40,1
2	UP2K, PKK & KPA	290.000.000,00	97.980.000,00	33,7

Sumber: Laporan DPM Kabupaten Sleman Semester II Tahun 2013

Dengan adanya Program Dana Penguatan Modal, diharapkan masyarakat semakin yakin untuk memulai usaha baik secara individu maupun kelompok karena salah satu permasalahan yang menakutkan yakni modal, sudah difasilitasi oleh pemerintah. Selain itu, dengan menerima dana penguatan modal, individu atau kelompok tersebut juga akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari instansi teknis terkait atau Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal (KP3M) Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal di Kabupaten Sleman belum mencapai target dari sisi jumlah penerima. Target sasaran penerima dana sebanyak 827, namun data pada Desember 2013 menyebutkan bahwa penerima yang telah menerima dana penguatan modal sebanyak 745 penerima. Pencapaian sasaran penerima mencapai 90,08%. Pencapaian ini merupakan prestasi yang baik karena pada pertengahan tahun 2013 jumlah penerima dana bahkan belum mencapai 50% yaitu hanya berkisar 33,6%. Jika dilihat dari sisi plafon yang ditetapkan. Untuk tahun 2013, plafon penyaluran dana yang ditetapkan sebanyak Rp20.915.000.000,00. Realisasi penyaluran dana penguatan modal semester I tahun 2013 hanya Rp6.314.500.000,00 atau hanya

29,86%. Namun, data Desember 2013 menyebutkan bahwa penyaluran DPM mencapai Rp22.403.000.000,00 atau sekitar 107,11% dari plafon yang ditetapkan. Dari keseluruhan dana plafon yang ditetapkan untuk Badan KB, PM, dan PP sebesar Rp1.800.000.000,00 terealisasi Rp2.380.000.000,00 atau sekitar 132%, dan dari 255 kelompok yang ditargetkan terealisasi seluruhnya atau 100%. Gambaran Plafon dan realisasi DPM Badan KB, PM dan PP dapat dilihat lebih jelas dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Plafon dan Realisasi Penyaluran Dana Penguatan Modal, Badan KB, PM, dan PP Semester II Tahun 2013

	Plafon (Juta Rp)	Realisasi (Juta Rp)	%	Target penerima	Realisa si	%
Badan KB, PM, dan PP	1.800	2.380	132	255	255	100
UPPKS	1.500	2.325	155	225	252	112
UP2K, PKK & KPA	300	55	18,33	30	3	10

Sumber: Laporan Pengelolaan Dana Penguatan Modal Semester II tahun 2013

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penyaluran DPM untuk kelompok UP2K, PKK & KPA masih jauh dari yang ditargetkan. Padahal secara umum realisasi penyaluran DPM mencapai lebih dari 100%, sedangkan untuk kelompok UP2K, PKK & KPA hanya terelisasi 2 dari 30 penerima yang ditargetkan atau hanya 10%. Hal ini, menimbulkan pertanyaan apakah jumlah kelompok UP2K, PKK & KPA di Kabupaten Sleman memang masih sedikit, dari sekian kelompok yang ada hanya sedikit kelompok yang memenuhi syarat untuk menerima DPM, atau sosialisasi yang masih kurang dari pengelola dana sehingga hanya sedikit kelompok yang terjangkau DPM. Sementara itu, penerima

DPM dari kelompok UPPKS realisasinya melampaui target baik dari segi plafon maupun jumlah penerima, semuanya melampaui 100%.

Keberadaan dana penguatan modal diharapkan dapat memberikan suntikan positif bagi kelompok-kelompok usaha masyarakat yang menerimanya. Namun, apakah dana ini penggunaannya dapat memenuhi harapan dari pemerintah, yakni memajukan penerimanya (kelompok UPPKS/UP2K), serta membantu perempuan untuk meningkatkan perannya dalam mendukung kondisi ekonomi keluarga. Kemudian apakah terdapat kendala atau permasalahan dari pencairan dan penggunaan atau mungkin dalam pengembalian dana penguatan modal tersebut, akan coba diungkap melalui penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul, yaitu:

1. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga masyarakat perlu diberdayakan untuk kreatif dan melakukan usaha produktif.
2. Kondisi biaya hidup semakin tinggi, keluarga yang hanya mengandalkan satu sumber penghasilan cenderung sulit bertahan terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.
3. Sebagian masyarakat takut untuk memulai usaha karena alasan permodalan dan masih bergantung pada pemberi kerja.
4. Keberadaan usaha-usaha masyarakat yang kesulitan bersaing dengan usaha lain yang lebih besar karena akses modal yang terbatas.

5. Perempuan pelaku usaha anggota UPPKS dan UP2K, keberadaannya sebagai usaha kecil dengan akses modal terbatas memerlukan bantuan dari pihak luar, yakni pemerintah.
6. Upaya pemberdayaan masyarakat ini tidak dapat berjalan dengan mudah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah (di Kabupaten Sleman melalui KP3M), terutama berkaitan dengan fasilitas dan permodalan.
7. Pengembalian dana penguatan modal oleh penerima DPM belum mencapai 100%.
8. Penyaluran dana penguatan modal di Kabupaten Sleman masih di bawah target dari sisi jumlah penerima, terutama untuk kelompok UP2K hanya mencapai 10%.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti melakukan pembatasan dalam masalah yang akan diteliti. Penelitian ini akan difokuskan pada kajian mengenai penyaluran dana penguatan modal dari KP3M Kabupaten Sleman bagi pelaku usaha perempuan yang tergabung dalam kelompok UPPKS dan UP2K di Kabupaten Sleman.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah kelompok pelaku usaha perempuan (UPPKS dan UP2K) penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman dapat merasakan manfaat dari pencairan dana tersebut?

2. Seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan oleh kelompok UPPKS/UP2K penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman?
3. Apa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh kelompok UPPKS/UP2K penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman?
4. Bagaimana peran perempuan di Kabupaten Sleman dalam kegiatan ekonomi dan dalam keluarga?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kelompok UPPKS/UP2K penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman dapat merasakan manfaat dari pencairan dana tersebut.
2. Untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan oleh kelompok UPPKS/UP2K penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh kelompok UPPKS/UP2K penerima dana penguatan modal di Kabupaten Sleman.
4. Untuk mengetahui peran perempuan pelaku usaha perempuan di Kabupaten Sleman dalam kegiatan ekonomin dan dalam keluarga.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang terkait dengan penanaman modal dan pemberdayaan masyarakat serta menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi kajian dan penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman, wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai penelitian, khususnya penelitian yang terkait dengan program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal penguatan modal, pada kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga.

b. Bagi Instansi/Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan pertimbangan bagi yang sudah instansi terkait, yakni Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Kantor P3M dalam rangka mengevaluasi Program Dana Penguatan Modal dan merumuskan terobosan yang akan menyempurnakan program tersebut serta menciptakan program baru yang lebih baik bila mungkin.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat menarik pelajaran dari penelitian ini dan menjadi terinspirasi untuk memulai kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif, seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi objek penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pembangunan Ekonomi

a. Definisi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lazim digunakan sebagai salah satu indikator dari kemajuan dan kesejahteraan suatu negara di mata negara lain. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat pendapatan perkapita dari sebuah negara. Menurut Sadono Sukirno (2011: 423), pembangunan ekonomi bukan hanya mengenai perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga mencakup modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan masalah pemerataan pembagian pendapatan.

b. Tujuan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin maju pembangunan ekonomi suatu negara, semakin sejahtera pula masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat tercermin dari kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan semakin berkurangnya kesenjangan antar masyarakat. Dengan kata lain, berkurangnya

kemiskinan masyarakat merupakan salah satu hasil dari pembangunan ekonomi.

c. Indikator Pembangunan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai indikator yang terbagi kedalam indikator ekonomi dan indikator non-ekonomi. Indikator-indikator tersebut antara lain:

1) Indikator ekonomi

a) GNP (*Gross National Product*) atau Produk Nasional Bruto

Pendapatan nasional riil menunjukkan jumlah output barang-barang jadi dan jasa suatu negara. Negara dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional riil-nya mengalami peningkatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional riil yaitu Produk Nasional Bruto riil yang berlaku dari tahun ke tahun.

b) Kesejahteraan Penduduk

Pembangunan ekonomi berimbas pada peningkatan kesejahteraan material yang terus-menerus dan berjangka panjang. Peningkatan kesejahteraan terjadi secara merata pada seluruh kawasan. Tingkat kesejahteraan dapat pula diukur dengan pendapatan riil per kapita.

c) Tenaga Kerja dan Pengangguran.

Pengangguran merupakan selisih antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Angkatan kerja

adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu.

2) Indikator non-ekonomi

a) Indeks Kualitas Hidup

Indeks kualitas hidup (IKH) atau *Physical Quality of life Index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi.

b) Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam

peningkatan *knowledge*, *attitude* dan *skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

2. Kemiskinan

Kemiskinan secara sederhana dapat diartikan sebagai rendahnya tingkat pendapatan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan digolongkan menjadi dua yaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak (absolut) ialah suatu kondisi dimana seseorang pendapatannya berada pada atau di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan (*poverty line*) untuk Indonesia, yakni sejumlah uang yang senilai dengan 21.000 kalori setara beras sehari per orang. Sedangkan kemiskinan relatif ialah kemiskinan yang diukur dengan membandingkan kondisi seseorang atau kelompok dengan orang atau kelompok lain. Seseorang atau kelompok dianggap miskin relatif jika kondisinya lebih buruk dari orang atau kelompok lain (Arsyad: 1997).

Untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, perlu ditanamkan bahwa kemiskinan tidak akan lepas begitu saja tanpa peran aktif dari diri mereka sendiri. Sekian banyak usaha pemerintah untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan akan sia-sia tanpa peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Pemahaman tersebut diharapkan akan mendorong masyarakat untuk aktif memberdayakan diri sehingga dapat membebaskan diri dari kemiskinan. Terutama untuk negara seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang tinggi, akan sulit bagi kebijakan

pemerintah untuk dapat menjangkau keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, peran aktif dari masyarakat itu sendiri sangatlah penting.

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat sejahtera (Sumodiningrat, 2009: 60). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, dengan mengembangkan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang diupayakan salah satunya dengan membentuk membentuk kelompok-kelompok usaha.

Dengan adanya kelompok-kelompok usaha masyarakat, anggota dapat saling mendukung, bekerja sama dan menjadi mandiri terutama dalam hal ekonomi. Potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat dikembangkan dengan dukungan pemerintah terutama dalam hal finansial, yakni permodalan.

b. Langkah-langkah Pemberdayaan Masyarakat

Langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan diantaranya (Zulkarnaian, 2003: 14):

- 1) Identifikasi terhadap pelaku ekonomi mengenai potensi usahanya.
- 2) Program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendampingan.
- 3) Program pendidikan dan pelatihan mengembangkan usaha.
- 4) Koordinasi dan evaluasi secara periodik antarinstansi yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, maupun penerapan teknologi.

Kemandirian masyarakat adalah hal yang wajib diupayakan untuk menjamin kemampuan setiap warga negara dalam menjamin kesejahteraan dirinya. Kemandirian ini dapat diperoleh dengan mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam masyarakat. Jiwa kewirausahaan adalah jiwa yang dimiliki oleh wirausahawan. Wirausahawan menurut *The American Heritage Dictionary* dalam Mulyadi Nitisastro (2012), didefinisikan sebagai seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba. Akan tetapi, secara sederhana bisa diartikan bahwa wirausahawan adalah orang yang menjalankan atau memiliki usaha, baik itu secara kelompok maupun individu.

4. Pemberdayaan Perempuan

Menurut Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dimuat dalam Gusmantiana-Kompasiana (2013), bahwa secara teoritis ada tiga peran utama perempuan di Indonesia. Ketiga peran itu adalah *pertama* peran reproduktif, yakni hamil, melahirkan, menyusui, dan merawat anak dan keluarga. *Kedua*, peran sosial yaitu peran yang berkaitan dengan membantu masyarakat. *Ketiga*, peran produktif yaitu perempuan berperan dalam berbagai profesi yang menghasilkan baik itu barang maupun jasa. Selain itu, Beliau juga menyampaikan bahwa pelaku kewirausahaan di Indonesia sebanyak 90%-nya adalah UMKM dan 60% dari pelaku UMKM tersebut adalah perempuan. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi wanita untuk diberdayakan. Sehingga kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi akan semakin dapat dirasakan hasil nyatanya.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Kesejahteraan keluarga berarti juga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan perlu diupayakan dari keluarga. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan program Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan UP2K yang berupa kelompok-kelompok usaha yang anggotanya mayoritas terdiri dari perempuan. Kelompok-kelompok usaha yang

dijalankan oleh para wanita ini umumnya hanya berskala kecil sehingga dapat digolongkan sebagai Usaha kecil atau UMKM.

a. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) merupakan bagian dari usaha pemberdayaan masyarakat melalui keluarga. UPPK ini merupakan program yang dicanangkan Pemerintah Sleman melalui Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan. Di Kabupaten Sleman, UP2K merupakan pengembangan dari PKK, yakni UPPK-PKK.

UPPK-PKK merupakan kelompok binaan Badan KB, PM dan PP yang beranggotakan perempuan. Kelompok ini merupakan pengembangan dari kelompok PKK. Dalam UPPK-PKK para anggota melakukan kegiatan layaknya yang dilakukan oleh sebuah koperasi meskipun secara sederhana yakni simpan-pinjam, karena itu UPPK-PKK ini merupakan kelompok pra-koperasi. Kegiatan rutin kelompok UPPK-PKK adalah pelatihan ketrampilan dan kegiatan simpan-pinjam yang dijadwalkan setidaknya satu kali dalam satu bulan.

b. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan merupakan kelompok produktif, program BKKBN dalam usaha pemberdayaan masyarakat. Dalam pedoman pengelolaan dan pengembangan kelompok UPPKS, diharapkan adanya peningkatan pendapatan keluarga yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan,

baik dari keluarga yang bersangkutan maupun dari seluruh anggota kelompoknya. Dengan peningkatan kesejahteraan tersebut, diharapkan kesertaan dan kesinambungan ber-KB secara tidak langsung dapat ditingkatkan.

Program ini dikembangkan lebih luas tahun 1979 melalui pendekatan kelompok, dengan anggotanya yang mayoritas adalah ibu-ibu akseptor KB dengan kegiatan yang dikenal sebagai UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Pada tahun 1990 UPPKA diubah menjadi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) untuk mencakup sasaran yang lebih luas yaitu dengan melibatkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB, Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera I (KS I), dan Keluarga lain yang berminat menjadi anggota Kelompok UPPKS.

UPPKS merupakan kelompok yang anggotanya terdiri dari peserta KB (Keluarga Berencana) yang mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga. Meskipun saat ini sudah digalakan peserta KB pria, namun anggotanya masih sedikit karena masih kurangnya kesadaran ber-KB dari pria.

5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi UMKM

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar yang telah terbukti kuat dan mampu bertahan dari badai krisis pada tahun 1997. Sebagai pelaku ekonomi

yang paling dekat dengan rakyat memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi dan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pengertian UMKM, dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan:

- 1) Usaha mikro adalah usaha dengan kriteria,
 - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha kecil adalah usaha dengan kriteria,
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

b. Kelemahan UMKM

Kelemahan UMKM di Indonesia dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2010 - 2014

1) Kelembagaan

kelembagaan UMKM merupakan aspek penting yang perlu dicermati dalam membedah permasalahan UMKM. Lebih dan 51 juta usaha yang ada, atau lebih dan 99,9% pelaku usaha adalah Usaha Mikro dan Kecil, dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis. Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup. Dengan Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai. Upaya pemberdayaan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan luas, terlebih bagi daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.

2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kebanyakan Sumber daya manusia UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya.

3) Terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif

Akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar UMKM terbatas. Dalam hal pendanaan utamanya, UMKM memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bagi Usaha Mikro dan Kecil sering kali terjerat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan.

Adapun berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan UMKM menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Demikian juga UMKM sulit untuk memanfaatkan informasi pengembangan produk dan usahanya.

Kondisi di atas, berakibat terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing produk UMKM. Terlebih UMKM tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas. Kebanyakan mereka hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal, atau yang paling maju mereka dapat melakukan sedikit ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

6. Investasi

a. Definisi Investasi

Menurut Sadono Sukirno (2011: 121), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam modal atau pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa.

b. Sumber Dana Investasi

Sumber dana yang umumnya digunakan untuk investasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tabungan atau investasi pribadi. Sumber dana satu ini harusnya mudah diperoleh, akan tetapi seringkali keinginan dan semangat untuk berinvestasi tak disertai dengan keberadaan dana pribadi yang memadai atau bahkan tidak ada sama sekali.
- 2) Pinjaman (kredit). Sumber dana berupa pinjaman dapat berasal dari Bank, Pegadaian, maupun dari fasilitas pembiayaan dari instansi pemerintah atau BUMN.
- 3) Kemitraan. Untuk mendapatkan dana dari sumber ini diperlukan adanya pemilik modal yang memiliki uang dan seseorang yang memiliki ide usaha. Seseorang yang memiliki ide usaha namun tidak memiliki cukup modal untuk mewujudkannya bisa mencari orang yang memiliki modal baik dari orang terdekat maupun orang yang tidak dikenalnya sama sekali, yang mau membiayai ide usahanya tersebut.

7. Modal Usaha

Modal merupakan bagian dari faktor produksi yang penting artinya dalam sebuah kegiatan produksi. Modal usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

Modal diperlukan untuk dapat memulai usaha. Modal umumnya berupa uang, dengan uang atau modal inilah pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya. Suherman Rosyidi (2011:56), “modal juga mencakup arti uang yang tersedia di dalam perusahaan untuk membeli mesin-mesin serta faktor produksi lainnya.” Sebuah produksi misalnya, membutuhkan bahan baku, teknologi produksi, dan tenaga kerja. Untuk memperoleh bahan baku, teknologi produksi, serta upah bagi tenaga kerja diperlukan uang. Seringkali sebuah usaha terhambat perkembangannya karena keterbatasan modal yang dimiliki.

Kinerja suatu usaha sangat berkaitan dengan modal yang ada karena setiap kegiatan sebuah usaha membutuhkan modal. Modal terutama dibutuhkan untuk melengkapi faktor produksi lain seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan *skill* pun membutuhkan modal.

Modal terdiri dari dua jenis, yakni modal sendiri dan modal asing (pinjaman). Modal sendiri ialah modal yang berasal dari pemilik usaha itu sendiri. Sedangkan modal asing (pinjaman) merupakan modal yang

bersumber dari luar pemilik usaha. Modal asing dapat berupa hutang, pinjaman, ataupun hibah.

8. Pinjaman (Kredit)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. “

Pinjaman atau sering juga disebut dengan kredit ialah mempergunakan uang yang bukan milik sendiri (bisa berasal dari individu ataupun bank dan lembaga lainnya) dengan kesepakatan yang mengharuskan untuk dikembalikan di waktu yang akan datang. Pinjaman yang berasal dari Bank atau lembaga lainnya biasanya mensyaratkan adanya bunga, imbalan atau jasa, atau bagi hasil dari keuntungan saat mengembalikan pinjaman.

9. Penguatan Modal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penguatan merupakan proses, cara, perbuatan menguatkan atau menguatkan. Penguatan modal yang dibahas disini ialah penguatan dengan cara penambahan modal yakni dana pinjaman DPM. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sleman bertujuan memberikan penguatan modal berupa dana pinjaman kepada pelaku usaha di wilayah Kabupaten tersebut melalui program DPM.

Penguatan modal umumnya digunakan dalam peningkatan kinerja usaha. Peningkatan kinerja usaha pada akhirnya akan membawa pengaruh positif, yakni peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini dirasakan tidak hanya oleh pemilik usaha tetapi juga oleh karyawan atau tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan ketika kinerja suatu usaha meningkat, pemilik usaha akan memiliki kemampuan untuk dapat menggaji karyawan atau tenaga kerja dengan jumlah yang lebih baik pula.

10. Dana Penguatan Modal

Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan peluang usaha guna peningkatan pendapatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Sleman meluncurkan program pendanaan bagi usaha produktif di wilayahnya. Program tersebut bertajuk dana penguatan modal. Dana penguatan modal adalah dana bergulir yang disediakan kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha mikro, kecil dan menengah, unit pengelola program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang diperuntukkan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usaha.

Sumber dana penguatan modal ialah:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
- d. Pengembalian angsuran pokok dana penguatan Modal

Tujuan dana penguatan modal adalah:

- a. Meningkatkan kinerja usaha orang pribadi, kelompok tani, koperasi, usaha kecil dan menengah penerima dana penguatan modal.
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluass kesempatan kerja di wilayah sekitar tempat usaha penerima dana penguatan modal.

Sasaran pemberian dana penguatan modal sebagai berikut:

- a. Orang pribadi;
- b. Kelompok tani, termasuk kelompok lumbung pangan dan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM);
- c. Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- d. Koperasi;
- e. Usaha Kecil dan Menengah (UKM), termasuk kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), kelompok PKK Padukuhan, kelompok Kegiatan Perlindungan Anak (kelompok PAUD dan kelompok Pendukung ASI), pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL).

Penerima pinjaman DPM memiliki jangka waktu pengembalian dana penguatan modal paling lama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan masa tenggang (*grace period*) 4 (empat) bulan. Masa tenggang (*grace period*) adalah masa pada awal periode angsuran

dimana penerima dana penguatan modal tidak membayar angsuran pokok tetapi diwajibkan membayar kontribusi.

Kontribusi adalah imbal jasa atas pemanfaatan dana penguatan modal. Penerima dana penguatan modal wajib memberikan kontribusi sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total dana penguatan modal yang diterimanya selama jangka waktu pemberian dana penguatan modal. Selama masa tenggang (*grace period*) penerima dana penguatan modal wajib membayar kontribusi.

Untuk dapat menerima pinjaman DPM ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh individu maupun kelompok calon penerima, yaitu:

a. Kriteria umum

- 1) Memiliki kegiatan usaha dan beroperasi secara nyata dalam masyarakat.
- 2) Tidak sedang menerima dana dari program sejenis.
- 3) Mempunyai perencanaan yang terarah dalam hal pemanfaatan dana penguatan modal

b. Kriteria khusus

Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan: kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), kelompok PKK Padukuhan dan kelompok Kegiatan Perlindungan Anak (kelompok PAUD dan kelompok Pendukung ASI)

yang memiliki kegiatan usaha aktif dan dinamis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

B. Penelitian yang Relevan

1. Tesis yang disusun oleh Mohamad Anugrah Hamonangan pada tahun 2010 yang berjudul “Kajian Partisipasi Penerima Manfaat Dana Bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang” dengan hasil penelitian:
 - a. Pelaksanaan tahap kegiatan pencairan dana bergulir sudah sesuai dengan pedoman umum maupun pedoman khusus P2KP.
 - b. Peran masyarakat penerima manfaat dana bergulir sebagai bentuk partisipasi masyarakat menempatkan partisipasi Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Tawang Mas terhadap pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana bergulir program P2KP berada pada tingkatan *delegated power*, dimana partisipasi mendapat tempat dan apresiasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk dukungan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemecahan masalah maupun evaluasi program dan kelompok masyarakat merasa bahwa ide awal pembentukan KSM adalah merupakan ide masyarakat sendiri, pengelolaan program ada pada masyarakat sendiri, adanya limpahan kewenangan pada masyarakat untuk membuat keputusan dan peran pemerintah dalam pemecahan masalah adalah dengan tanpa paksaan.

- c. Bahwa penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif dan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
2. Jurnal yang ditulis oleh Yetti Oktarin pada tahun 2009 dengan judul “Dampak Dana Penguatan Modal untuk Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Padi Sawah di Desa Gunung Kuripan Kec. Pengandonan Kabupaten OKU” dengan hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Dengan adanya penyaluran Dana Penguatan Modal bagi Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) tampak bahwa ada pengaruh terhadap kesetabilan harga, walaupun tidak 100% dapat menstabilkan harga jual gabah dan beras di tingkat petani.
 - b. Tingkat pendapatan petani mitra DPM-LUEP meningkat, karena harga penjualan gabah dan berasnya lebih tinggi bila dibandingkan harga jual gabah dan beras di pasaran umum yang diperoleh petani bukan mitra DPM-LUEP.
 3. Skripsi yang ditulis oleh Rika Puspita Sari pada tahun 2011 yang berjudul “Peranan bantuan program penguatan modal usaha terhadap usaha pengolahan pisang pada kelompok wanita tani (KWT) Maju Bersama di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar” menyimpulkan sebagai berikut:
 - a. Peranan bantuan PMUK terhadap produksi keripik pisang KWT Maju Bersama adalah terbukti dengan meningkatnya produksi dari 30 Kg

menjadi 188Kg atau 526,67 %, dimana pada akhirnya akan menambah omset dan keuntungan KWT Maju Bersama.

- b. Terjadinya peningkatan keuntungan sebelum mendapatkan bantuan PMUK setelah mendapatkan bantuan PMUK. Hanya saja jumlah anggota perlu diperbanyak sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja dan sekaligus mengurangi pengangguran.
- c. Terjadinya peningkatan omset sebelum mendapatkan bantuan PMUK setelah mendapatkan bantuan PMUK. Perlu dilakukan pengembangan pemasaran ke berbagai daerah, mengingat keripik pisang ini banyak diminati oleh masyarakat sebagai oleh-oleh.
- d. Permasalahan yang terjadi pada KWT Maju Bersama adalah sulitnya memperoleh bahan mentah dari pisang itu sendiri.

C. Kerangka Berfikir

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal melaksanakan Program Dana Penguatan Modal. Dana penguatan modal merupakan dana yang diberikan kepada pelaku usaha di Kabupaten Sleman berupa pinjaman untuk dapat mengembangkan usahanya. Bagi pelaku usaha, dalam hal ini kelompok UPPKS dan UP2K, adanya dana bantuan ini diharapkan dapat mengatasi salah satu permasalahan utama yang seringkali menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, yakni dalam hal permodalan.

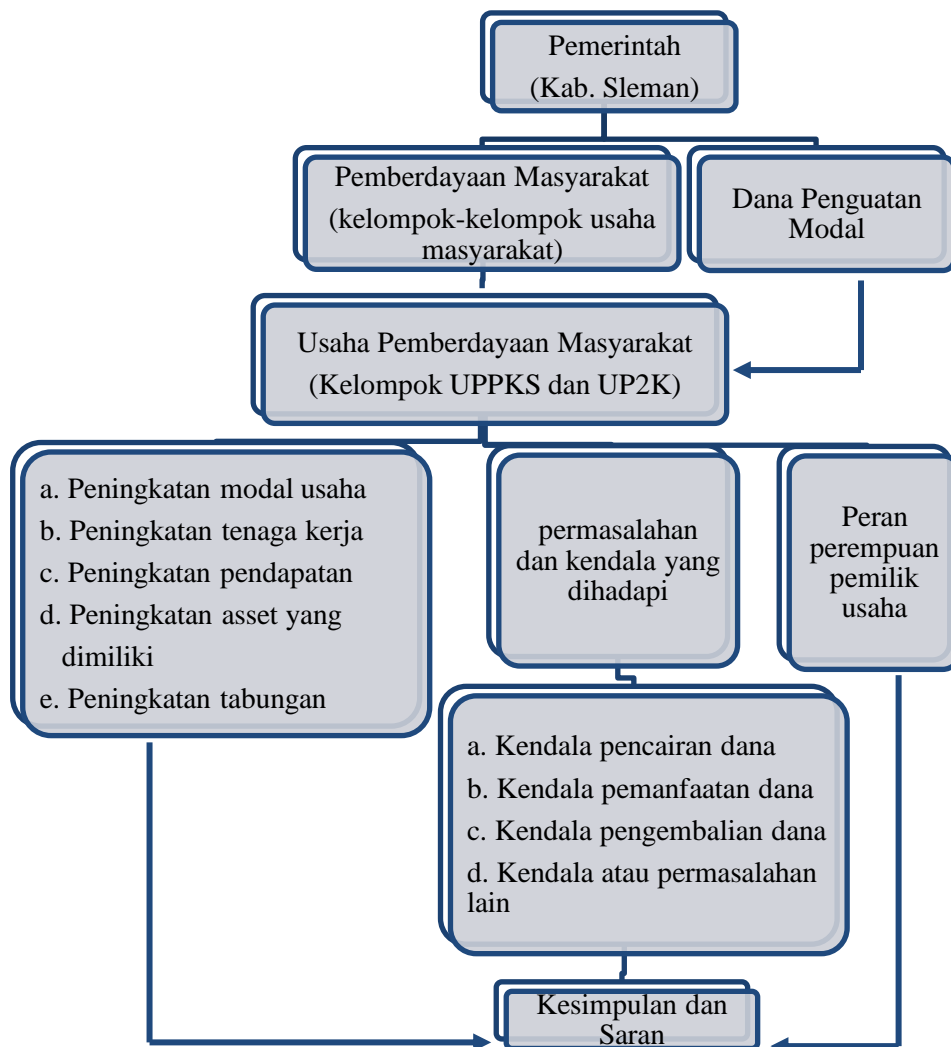
Menerima dana pinjaman, dalam hal ini DPM menjadikan pelaku usaha memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan usahanya.

Mendapatkan dana pinjaman berarti mendapat tambahan modal, yang merupakan unsur terpenting dalam mengelola usaha. Tambahan modal dapat digunakan untuk menambah aset, menggaji lebih banyak karyawan, mengganti atau menambah peralatan produksi, maupun digunakan untuk membeli input dengan kualitas lebih. Harapan akhir dari penggunaan tambahan modal ini ialah kemajuan dari usaha tersebut.

UPPKS dan UP2K merupakan kelompok usaha yang anggotanya terdiri dari perempuan. Tatanan sosial saat ini memang sudah berubah. Dulu dalam sebuah keluarga laki-laki atau suami yang bekerja mencari nafkah dan istri berada di rumah mengurus keluarga. Namun saat ini, sudah menjadi hal yang lazim seorang istri berkegiatan di luar rumah dengan berorganisasi bahkan ikut membantu suami dalam mencari nafkah.

Melalui kelompok UPPKS/UP2K perempuan-perempuan ini dapat mengajukan pinjaman modal untuk membuka usaha baru maupun untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Dari sisi pemerintah ingin membantu masyarakat untuk menyediakan fasilitas guna mendukung usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperoleh DPM perempuan anggota UPPKS/UP2K akan dapat menambah modal, meningkatkan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, asset yang dimiliki, serta menambah jumlah tabungan. Dalam pemanfaatannya penerima DPM mungkin mengalami kendala atau kesulitan yang menghambat atau mengurangi kemanfaatan dari dana yang diperoleh.

Secara lebih ringkas kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat dalam bagan berikut.



Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Kajian manfaat dana penguatan modal pada Kelompok-Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif. Menurut Mudrajad Kuncoro (2003:08), penelitian deskriptif ialah penelitian yang berusaha mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan subjek penelitian untuk kemudian diuji guna menjawab pertanyaan mengenai kondisi nyata dari subjek penelitian tersebut. Penelitian ini berusaha menggambarkan keadaan penerima DPM, berkaitan dengan manfaat yang diterima dan kendala yang dialami, serta perannya sebagai perempuan dalam kegiatan ekonomi dan dalam keluarga.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan mendatangi langsung responden dan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan berupa angket (kuesioner) dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait, berupa data karakteristik Kabupaten Sleman, dana penguatan modal dan data kelompok UPPKS dan UP2K penerima bantuan dana penguatan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Pengambilan data untuk penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan April-Juli tahun 2014.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki variabel tunggal yakni Dana Penguatan Modal bagi kelompok UPPKS dan UP2K yang menerima dana tersebut. Variabel tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Manfaat dari penerimaan dana penguatan modal.
2. Perkembangan usaha penerima dana penguatan modal, meliputi 1) peningkatan modal usaha, 2) peningkatan tenaga kerja, 3) peningkatan pendapatan, 4) peningkatan asset yang dimiliki, dan 5) peningkatan tabungan.
3. Permasalahan dan kendala, meliputi, 1) kendala pencairan dana, 2) kendala pemanfaatan dana, 3) kendala pengembalian dana, serta 4) kendala atau permasalahan lain.
4. Peran perempuan pemilik usaha penerima dana penguatan modal dalam kegiatan ekonomi dan dalam keluarga.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Manfaat dari penerimaan dana penguatan modal

Manfaat merupakan hal positif yang diperoleh oleh kelompok UPPKS dan UP2K yang menerima pinjaman dana penguatan modal setelah menerima dana pinjaman tersebut. Perubahan positif yang dialami oleh kelompok

setelah menerima dana penguatan modal meliputi perubahan positif dalam usaha yakni perkembangan usaha maupun perkembangan dari sisi ekonomi keluarga, yakni meningkatnya kesejahteraan keluarga.

2. Perkembangan usaha kelompok penerima dana penguatan modal

Perkembangan usaha kelompok penerima dana penguatan modal akan dilihat dari aspek-aspek berikut: 1) peningkatan modal usaha, 2) peningkatan tenaga kerja, 3) peningkatan pendapatan, 4) peningkatan asset yang dimiliki, 5) peningkatan tabungan.

3. Permasalahan dan kendala

Permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi oleh penerima dana penguatan modal. Kendala yang dimaksud di sini meliputi kendala yang berasal dari penerima DPM itu sendiri maupun kendala yang berasal dari pihak lain berkaitan dengan prosedur dan pelayanan DPM. Permasalahan dan kendala tersebut dipisahkan ke dalam: 1) kendala pencairan dana, 2) kendala pemanfaatan dana, 3) kendala pengembalian dana, 4) kendala atau permasalahan lain.

4. Peran perempuan pemilik usaha dalam kegiatan ekonomi dan dalam keluarga

Peranan perempuan anggota UPPKS dan UP2K penerima dana DPM sebagai seorang Ibu rumah tangga, sebagai pengusaha, sekaligus sebagai anggota dari kelompok UPPKS/UP2K.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi untuk penelitian ini adalah kelompok-kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kabupaten Sleman yang menerima Dana Penguatan Modal di bawah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Manusia dan Perlindungan Anak. Populasi penelitian ini terdiri dari 974 kelompok UPPKS dan 24 kelompok UP2K.

2. Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive* dimana penentuan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dilakukan guna menjamin kesesuaian sampel dengan tujuan penelitian dan dengan mempertimbangkan keterbatasan peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok sampel yang memiliki karakteristik homogen yakni kelompok UPPKS dan kelompok UP2K. Kelompok UPPKS dan kelompok UPPK adalah kelompok penerima DPM yang beranggotakan perempuan.

Kelompok sampel pertama. Sampel kelompok pertama terdiri dari kelompok UPPKS penerima DPM dengan kriteria:

- a. Kelompok UPPKS yang diambil sebagai sampel beranggotakan perempuan.

- b. Kelompok UPPKS yang diambil sebagai sampel sudah memanfaatkan atau menerima DPM setidaknya enam bulan saat dilakukannya pengambilan data.

Kelompok sampel kedua. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok-kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kabupaten Sleman yang menerima dana penguatan modal periode pencairan tahun 2012 dan 2013, sebanyak 24 kelompok. Akan tetapi, jumlah sampel ini akan diperkecil dengan hanya mengambil kelompok-kelompok yang pada saat dilakukannya penelitian dana penguatan modal yang diterima masih belum jatuh tempo.

Peneliti menentukan jumlah sampel untuk penelitian ini dengan metode kuota, yakni, pengambilan sampel dilakukan terhadap anggota populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai terpenuhi jumlah kuota yang diinginkan. Total sampel yang akan diambil untuk penelitian ini sebanyak 50 sampel.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket kuisisioner

Melalui kuisisioner akan diperoleh data mengenai manfaat yang dirasakan, permasalahan, serta kendala apa yang dihadapi oleh kelompok UPPKS dan UP2K penerima Dana penguatan Modal di kabupaten Sleman.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi berkaitan dengan penelitian. Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan

informasi apa adanya dan tidak untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat narasumber. Sehingga informasi yang diperoleh benar-benar aktual dan valid, sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai kegiatan pencairan dan pemanfaatan dana penguatan modal dan sejauh mana pemanfaatan dana tersebut bagi usaha mereka. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, dengan alasan bahwa peneliti ingin menggali semua informasi dari narasumber sebanyak mungkin. Selain itu, wawancara juga dilakukan secara acak kepada responden untuk melakukan tinjauan ulang pada jawaban responden dalam kuisioner.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data sekunder, guna melengkapi data yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara. Data dokumentasi dapat berupa catatan, transkrip buku, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperlukan meliputi data mengenai kelompok UPPKS dan UP2K di Kabupaten Sleman terutama kelompok UPPKS dan UP2K yang menerima bantuan pinjaman dana penguatan modal yang diperoleh dari Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal Kabupaten Sleman.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Angket (kuisisioner)

Penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa angket (atau kuisisioner) yang terdiri dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup dalam angket menggunakan skala jawaban bertipe-Likert. Pertanyaan tipe ini memungkinkan responden memilih satu dari beberapa derajat (biasanya lima) perasaan tentang pernyataan yang bergerak dari yang paling menyenangkan atau bernada persetujuan ke yang paling tidak menyenangkan atau bernada ketidaksetujuan (Edy Suhardono, 2001: 62).

Instrumen penelitian ini, menggunakan skala jawaban bertipe Likert dengan 4 skala jawaban yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Sangat Tidak Setuju (STS).

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan acuan bagi peneliti saat melakukan wawancara dengan responden. Pedoman wawancara berisi garis besar pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk digali informasinya oleh peneliti dari responden. Wawancara juga dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner.

Adapun pengembangan instrumen studi eksplorasi program DPM pada pelaku usaha perempuan di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Pengembangan Instrumen Penelitian

No.	Sub Variabel	Aspek	Sumber Data	Metode
1	Manfaat penerimaan Dana Penguatan Modal	Adanya perubahan positif bagi penerima dana penguatan modal	Kelompok UP2K	Angket Wawancara
2	Perkembangan Usaha Kelompok	a. Peningkatan modal usaha b. Peningkatan tenaga kerja c. Peningkatan pendapatan d. Peningkatan asset yang dimiliki e. Peningkatan tabungan	Kelompok UPPKS dan UP2K	Angket Wawancara
3	Kendala dan permasalahan yang dihadapi	a. Pencairan dana b. Pemanfaatan dana c. Pengembalian dana	Kelompok UPPKS dan UP2K	Angket Wawancara
4	Peranan Perempuan dalam Ekonomi keluarga	Kontribusi perempuan pemilik usaha dalam memenuhi kebutuhan keluarganya	Kelompok UPPKS dan UP2K	Angket Wawancara

Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Sub variabel	Aspek	No. Pertanyaan
Manfaat penerimaan Dana Penguatan Modal	Adanya perubahan positif bagi penerima dana penguatan modal, pada: a. Perkembangan usaha b. Kesejahteraan penerima dan keluarga	C,F
Perkembangan Usaha Kelompok	a. Peningkatan modal usaha b. Peningkatan tenaga kerja c. Peningkatan pendapatan d. Peningkatan asset yang dimiliki e. Peningkatan tabungan	D
Kendala dan permasalahan yang dihadapi	a. Pencairan dana b. Pemanfaatan dana c. Pengembalian dana	E, F, G, H
Peranan Perempuan pelaku usaha	a. Peran perempuan pemilik usaha dalam keluarga b. Peran perempuan sebagai pelaku usaha c. Peran perempuan dalam kelompok usaha	Angket tambahan

H. Teknik Analisis Data

1. Editing

Proses editing ialah memeriksa kembali data yang diperoleh dari kuisisioner apakah data yang diperoleh sudah lengkap sehingga dapat diproses lebih lanjut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah kelengkapan pengisian kuisisioner, keterbacaan tulisan, relevansi jawaban dengan pertanyaan dan keseragaman.

2. Koding

Dalam koding dilakukan pengklasifikasian data atau jawaban responden ke dalam kategori tertentu. Sebelum data yang diperoleh diproses ke dalam

komputer terlebih dahulu data tersebut dirubah kedalam bentuk numeric atau angka.

d. Tabulasi

Tabulasi merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk tabel berisikan data sesuai dengan yang dibutuhkan untuk analisis. Tujuan dari tabulasi ialah untuk mengelompokkan data kedalam tabel frekuensi agar diperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai hasil yang digambarkan angka-angka tersebut.

e. Analisis data dan pengambilan kesimpulan

Analisis data dilakukan untuk menjelaskan makna dan fakta yang ada dibalik angka-angka hasil penelitian secara deskriptif. Penjelasan diperoleh dengan menjabarkan hasil perhitungan statistik deskriptif dan tabel distribusi frekuensi hasil penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yakni kemanfaatan DPM, sejauhmana manfaat DPM, kendala dan permasalahan yang dihadapi penerima DPM, dan kontribusi perempuan pelaku usaha DPM dalam ekonomi keluarga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Berdasarkan situs resmi Kabupaten Sleman (<http://www.slemankab.go.id>) Kabupaten Sleman memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Letak Wilayah

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km^2 atau sekitar 18% dari luas Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 3.185,80 Km^2 . Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun.

c. Demografi (Kependudukan)

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kabupeten Sleman Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Laki-laki	484.952	481.491	499.344	563.111	558.900
Perempuan	477.574	487.314	505.197	569.888	555.933
Jumlah	962.526	988.806	1.004.541	1.132.999	1.114.833

(Sumber data: DI Yogyakarta dalam Angka 2013)

Berdasarkan data jumlah penduduk dari tahun 2010-2013, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Sleman cenderung lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

2. Gambaran Umum Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini terdiri dari para pelaku usaha perempuan anggota kelompok UPPKS dan UP2K di Kabupaten Sleman yang menerima pinjaman dana penguatan modal dari KP3M Sleman. Total penerima dana penguatan modal dari kelompok UPPKS dan UP2K adalah 998 kelompok, yang terdiri dari 974 kelompok UPPKS dan 24 kelompok UP2K. Dari keseluruhan kelompok UPPKS dan UP2K yang menerima DPM peneliti menetapkan kuota responden yang diambil sebagai sampel sebanyak 50 anggota.

Adapun deskripsi dari responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, responden dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai berikut.

Tabel 7. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Prosentase %
1	Tidak lulus SD	1	2
2	SD	3	6
3	SMP	2	4
4	SMA/SMK	35	70
5	D-1/D-2/D-3	5	10
6	S-1	2	4
7	Tidak Mengisi	2	4
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel dapat diketahui bahwa responden dari penelitian ini mayoritas adalah lulusan SMA/SMK/Sederajat yakni 70% atau 35 orang, 14% atau 7 orang responden menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi, dan hanya ada 1 orang responden atau 2% yang tidak lulus SD. Dilihat dari latar belakang pendidikan, mayoritas responden menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Sehingga responden memiliki bekal pengetahuan dasar yang cukup yang akan membantu dalam menjalankan usaha.

b. Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Berdasarkan status perkawinan, responden dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai berikut.

Tabel 8. Responden Berdasarkan Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Jumlah Responden	Prosentase %
1	Menikah	47	94
2	Belum Menikah	-	-
3	Duda/Janda	3	6
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 50 orang responden sebanyak 94% atau 47 orang responden penelitian ini berstatus menikah dan sisanya yaitu 6% atau 3 orang berstatus janda. Responden merupakan ibu rumah tangga yang menjalankan usaha untuk menambah pemasukan bagi keluarga.

c. Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, responden dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai berikut.

Tabel 9. Responden Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Responden	Prosentase %
1	31-40	17	34
2	41-50	21	42
3	51-60	4	8
4	61-70	1	2
5	Tidak mengisi	7	14
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas responden penelitian ini mayoritas berumur antara 41-50 tahun yaitu sebanyak 21 orang atau 42%, kelompok responden terbanyak kedua berada pada umur antara 31-40 tahun yaitu 17 orang atau 34%, sisanya 5 orang atau 10% berumur diatas 50 tahun.

Responden penelitian ini merupakan orang dewasa yang memiliki usia 30 tahun ke atas.

d. Responden Berdasarkan Bidang Usaha

Berdasarkan bidang usaha yang ditekuni, responden dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai berikut.

Tabel 10. Responden Berdasarkan Bidang Usaha

No	Bidang Usaha	Jumlah Responden	Prosentase %
1	Perdagangan	15	30
2	Jasa	9	18
3	Peternakan&Pertanian	9	18
4	Makanan	12	24
5	Kerajinan	3	6
6	Tidak mengisi	2	4
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa bidang usaha mayoritas responden penelitian ini ialah perdagangan disusul bidang makanan, masing-masing 15 orang atau 30% dan 12 orang atau 24%. Bidang jasa serta bidang pertanian dan peternakan masing-masing berjumlah 9 orang atau 18%, dan 3 orang atau 6% responden memiliki usaha dibidang kerajinan. Usaha responden penelitian ini termasuk dalam usaha kecil dan industri rumah tangga dengan jumlah paling banyak ada dibidang perdagangan yaitu warung dan makanan berupa *catering*, makanan ringan, serta jajanan.

e. Responden Berdasarkan Tahun Berdirinya Usaha

Berdasarkan lama usaha, responden dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai berikut.

Tabel 11. Responden Berdasarkan Tahun Berdirinya Usaha

No	Tahun	Jumlah Responden	Prosentase %
1	0 – 5 tahun	20	40
2	6 – 10 tahun	13	26
3	>10 tahun	15	30
5	Tidak mengisi	2	4
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan lama berdirinya usaha, responden penelitian ini dapat dikelompokkan dalam lama usaha: 0-5 tahun sebanyak 20 orang atau 40%, 6-10 tahun sebanyak 13 atau 26%, lebih dari 10 tahun 15 orang atau 30%. Lama usaha responden penelitian mayoritas kurang dari 10 tahun.

f. Responden Berdasarkan Jumlah Anggota dalam Kelompok

Berdasarkan jumlah anggota dalam kelompok, responden dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai berikut.

Tabel 12. Responden Berdasarkan Jumlah Anggota

No	Jumlah Anggota	Jumlah Responden	Prosentase %
1	5-9	23	46
2	10-19	13	26
3	20-29	1	2
4	≥ 30	5	10
5	Tidak mengisi	8	16
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer yang diolah

Setiap responden dalam penelitian ini tergabung dalam kelompok, baik UPPKS maupun UP2K. Mereka mendapatkan pinjaman DPM melalui kelompok tersebut. Tabel di atas memuat informasi distribusi jumlah anggota dari kelompok yang salah satu anggotanya menjadi responden.

Rata-rata kelompok UPPKS dan UP2K memiliki anggota antara 5-9 orang seperti yang tercantum dalam tabel yaitu berjumlah 23 kelompok atau 46%. Jumlah anggota terbanyak dalam satu kelompok adalah 46 orang dan jumlah paling sedikit dalam kelompok responden adalah 5 orang anggota.

g. Responden Berdasarkan Besarnya Jumlah Pinjaman yang Diterima

Jumlah pinjaman yang diterima oleh tiap kelompok UPPKS dan UP2K masing-masing kelompok berbeda-beda yakni antara Rp5.000.000,00 hingga Rp35.000.000,00. Jumlah yang diterima kelompok kemudian didistribusikan kepada anggota kelompok yang membutuhkan pinjaman. Jumlah yang diterima masing-masing anggota bergantung pada berapa jumlah DPM yang diterima kelompok dan jumlah anggota dalam kelompok tersebut yang membutuhkan pinjaman. Berikut ini rincian besarnya pinjaman yang diterima oleh responden.

Tabel 13. Responden Berdasarkan Jumlah Pinjaman yang Diterima

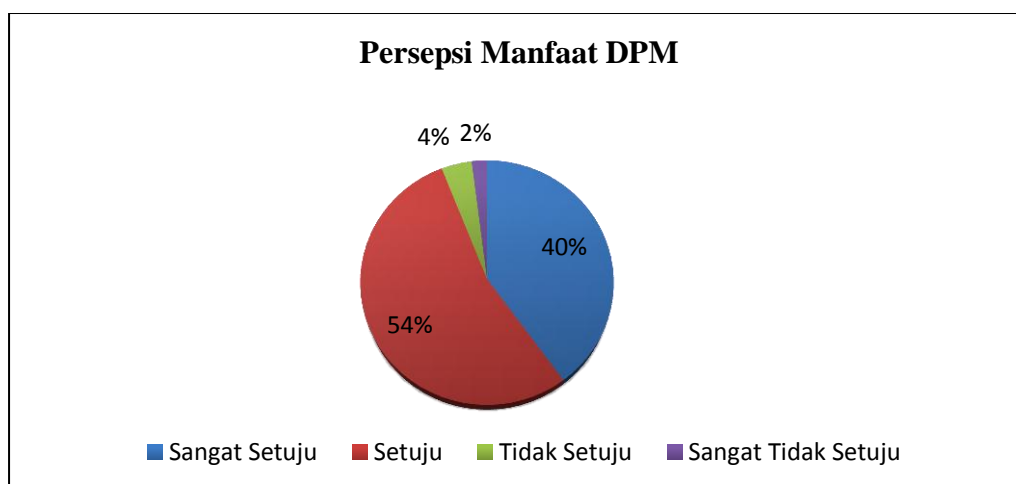
No	Besarnya Pinjaman (dalam Rupiah)	Jumlah Responden	Prosentase %
1	5.000.000,00	2	4
2	4.000.000,00	1	2
3	3.500.000,00	1	2
4	3.000.000,00	2	4
5	2.000.000,00	11	22
6	1.500.000,00	1	2
7	1.000.000,00	24	48
8	500.000,00	5	10
9	Tidak mengisi	3	6
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer yang diolah

Jumlah pinjaman yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok berkisar antara Rp500.000,00 sampai Rp5.000.000,00. Rata-rata pinjaman yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok adalah Rp1.563.829,78.

3. Manfaat dari Penerimaan Dana Penguatan Modal

Manfaat merupakan hal positif yang diperoleh atau dirasakan oleh anggota kelompok UPPKS dan UP2K yang menerima pinjaman dana penguatan modal setelah menerima dana pinjaman tersebut. Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan peneliti menanyakan pada responden mengenai persepsi kemanfaatan DPM secara umum yang hasilnya adalah sebagai berikut:



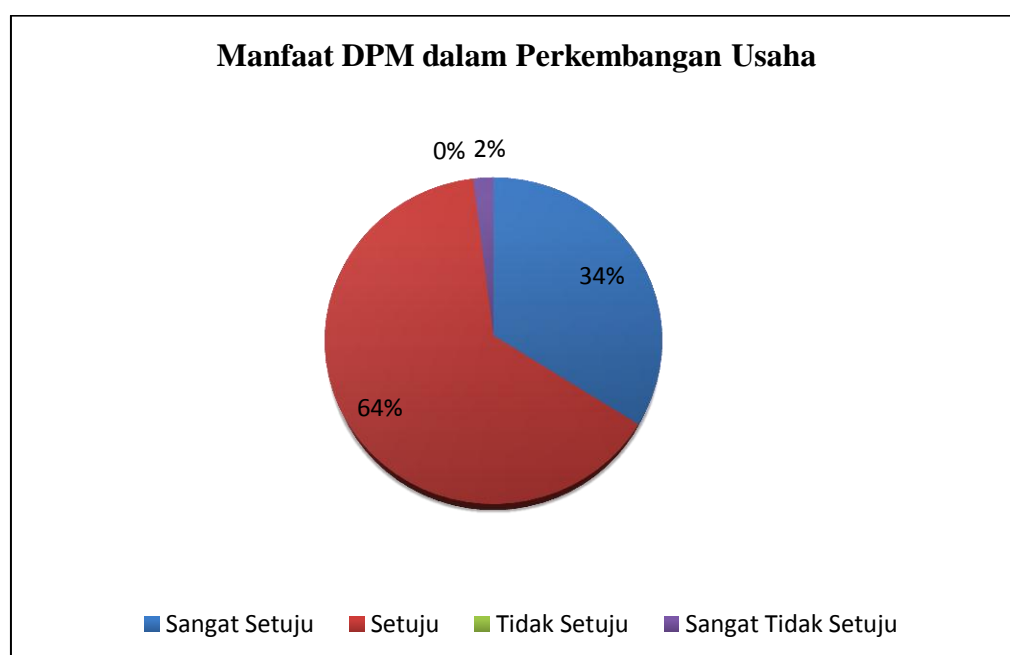
Gambar 2. Persepsi Manfaat DPM

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 20 orang atau 40% responden sangat setuju dan 27 orang atau 54% responden lainnya menyatakan setuju, sehingga dapat diketahui bahwa 47 orang atau 94% menyatakan bahwa DPM bermanfaat bagi mereka. Kemanfaatan DPM bagi penerimanya akan

menghasilkan perubahan positif yang dialami setelah menerima dana penguatan modal yang meliputi perubahan positif dalam perkembangan usaha dan perkembangan ekonomi keluarga, yakni meningkatnya kesejahteraan keluarga.

a. Kemanfaatan DPM dalam Perkembangan Usaha Penerima

Berikut ini hasil survei dari persepsi responden terhadap manfaat yang dirasakan dalam perkembangan usaha.



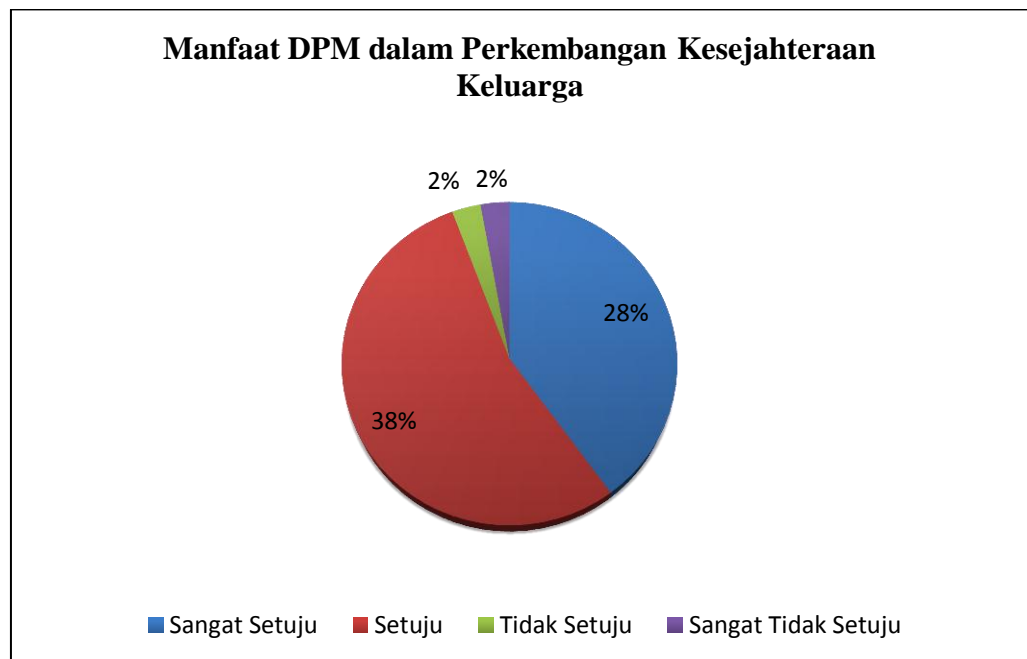
Gambar 3. Persepsi Manfaat DPM dalam Perkembangan Usaha

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara umum responden menyatakan setuju bahwa DPM bermanfaat dalam membantu perkembangan usaha mereka. Dari 50 responden hanya 2% yang menyatakan bahwa DPM tidak bermanfaat terhadap perkembangan usaha mereka. Bagi responden, DPM merupakan program yang

dibutuhkan sebagai sumber tambahan modal. Adanya DPM membantu penerima untuk meningkatkan kinerja dan membantu kesuksesan usaha.

b. Kemanfaatan DPM dalam Perkembangan Kesejahteraan Keluarga

Berikut ini hasil survei dari persepsi responden terhadap manfaat yang dirasakan dalam perkembangan kesejahteraan keluarga.



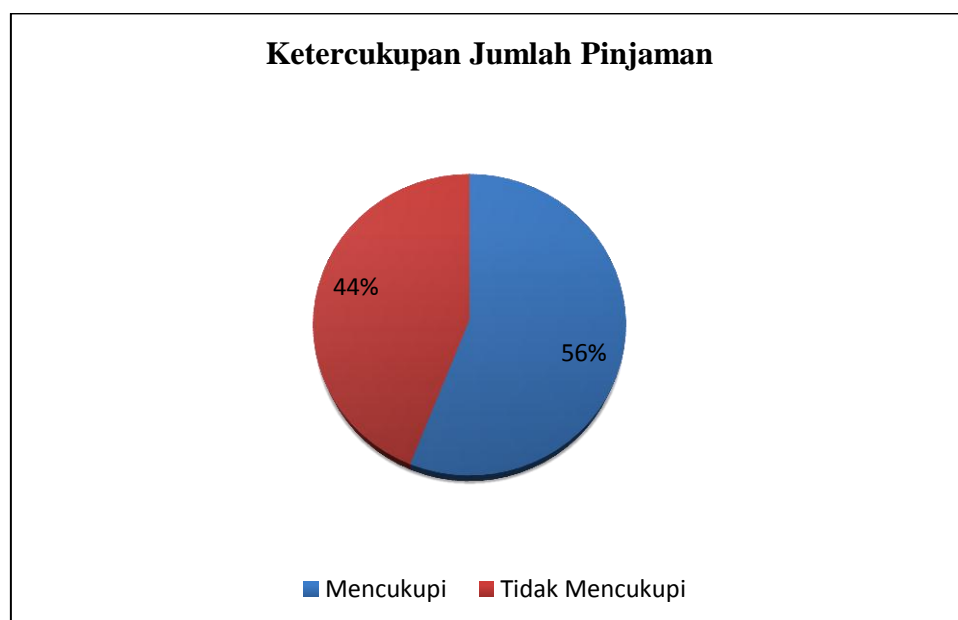
Gambar 4. Persepsi Manfaat DPM dalam Perkembangan Kesejahteraan Keluarga

Gambar di atas menunjukkan bahwa hanya 4% dari 50 responden yang menyatakan bahwa DPM tidak bermanfaat dalam perkembangan kesejahteraan keluarga mereka. Hal ini, sejalan dengan hasil pernyataan sebelumnya mengenai manfaat DPM terhadap perkembangan usaha. Perkembangan usaha akan meningkatkan kesempatan bagi keluarga pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Responden penelitian ini

menyatakan bahwa setelah menerima DPM tabungan yang mereka miliki bertambah.

c. Ketercukupan Jumlah Pinjaman DPM yang Diberikan

Menilai kemanfaatan DPM bagi pelaku usaha perempuan di Kabupaten Sleman, perlu juga melihat ketercukupan jumlah pinjaman yang diterima dengan jumlah yang dibutuhkan pelaku usaha. Berdasarkan data jumlah pinjaman yang diterima, tiap pelaku usaha menerima pinjaman antara Rp500.000,00 sampai Rp5.000.000,00. Berikut ini persepsi pelaku usaha penerima DPM terhadap ketercukupan dana yang diterima.



Gambar 5. Persepsi Ketercukupan Jumlah Pinjaman DPM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 28 dari 50 responden atau 56% responden menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang diterima sudah mencukupi kebutuhan mereka. Sedangkan 22 responden lainnya yaitu

44% menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang diterima belum atau tidak mencukupi kebutuhan mereka. Ketidacukupan yang dirasakan disebabkan ketimpangan antara jumlah pinjaman yang diterima kelompok dengan jumlah anggota dalam kelompok yang membutuhkan pinjaman.

d. Pengalokasian DPM oleh Penerima

Kemanfaatan DPM juga dapat dilihat dari pengalokasian dana oleh penerimanya. Tujuan pemberian DPM ialah untuk membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya sehingga kesejahteraan keluarganya juga menjadi lebih baik. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan bisa terjadi penyelewengan, dana DPM dipergunakan bukan untuk tujuan produktif melainkan untuk kegiatan konsumsi. Berikut ini hasil penelitian mengenai penggunaan dana DPM oleh pelaku usaha

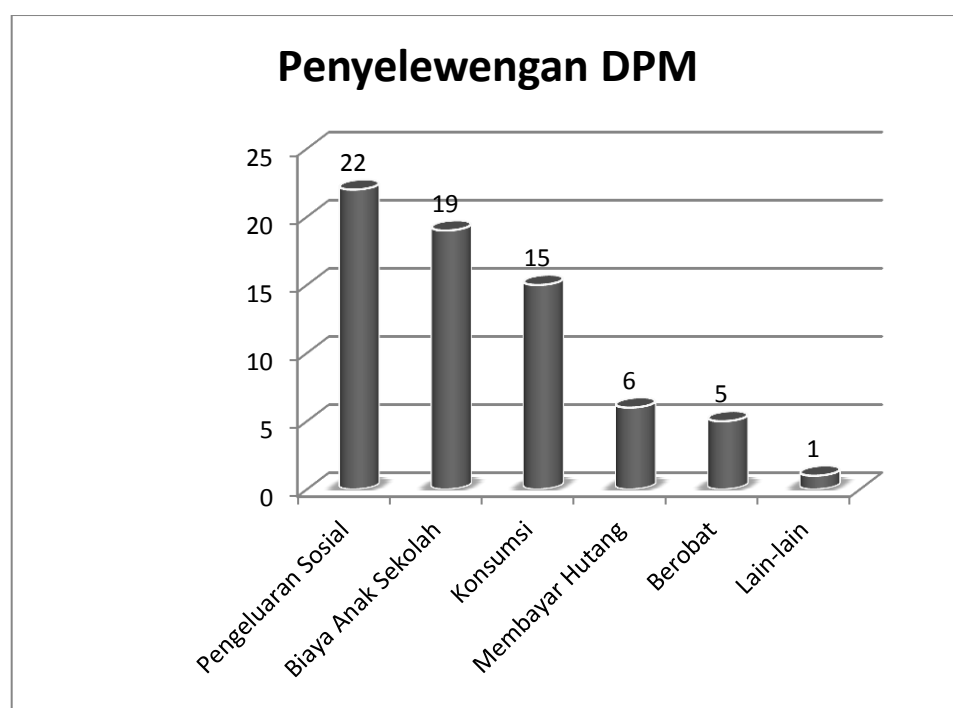
Tabel 14. Pengalokasian Penggunaan DPM:

Pemanfaatan DPM	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Kegiatan Produktif		
a. Modal Kerja	41	82
b. Membeli Asset	7	14
c. Tidak mengisi	2	4
Jumlah	50	100

Sumber: Data primer yang diolah

Dari 50 orang responden menurut data yang diperoleh, sebanyak 48 orang atau 96% memanfaatkan dana DPM untuk kegiatan produktif yaitu menambah modal kerja dan membeli asset. Hal ini sesuai dengan tujuan DPM, yakni diperuntukkan sebagai modal tambahan

dalam mengembangkan usaha. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 50 responden hanya 36% atau 18 responden murni memanfaatkan DPM untuk kegiatan produktif atau menginfestasikan dalam usaha. Terjadi penyelewengan yang dilakukan 64% responden dalam penggunaan dana DPM yang digambarkan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 6. Penyelewengan Penggunaan DPM

Untuk menggali penyelewengan yang dilakukan responden diperbolehkan memilih jawaban lebih dari satu sehingga diperoleh hasil seperti di atas. Selain memanfaatkan DPM untuk kegiatan produktif 32 responden juga menggunakannya untuk pengeluaran lain yakni biaya sekolah anak, biaya berobat, konsumsi sehari-hari, pengeluaran sosial (nyumbang, membantu saudara, dll), membayar

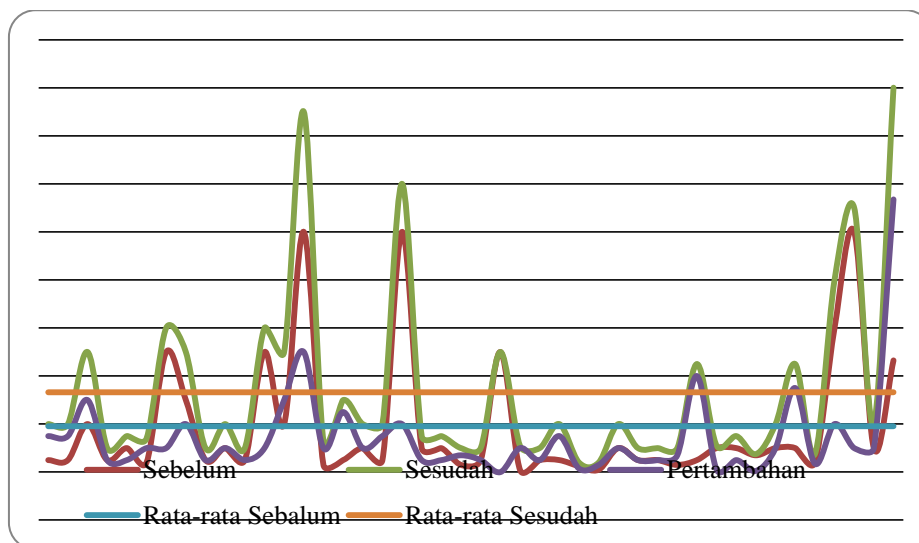
hutang, serta pengeluaran lainnya. Pengeluaran lain, selain untuk usaha produktif ini akan mempengaruhi kebermanfaatan dari DPM.

4. Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Dana Penguatan Modal

Perkembangan usaha kelompok penerima dana penguatan modal akan dilihat dari aspek-aspek berikut:

a. Peningkatan Modal Usaha

Berikut ini merupakan gambar grafik perubahan modal usaha penerima DPM.



Gambar 7. Modal Usaha Sebelum dan Sesudah Menerima DPM

Sedangkan ringkasan perubahan modal usaha penerima DPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data secara lengkap ada di lampiran.

Tabel 15. Perubahan dan Pertumbuhan Modal Usaha Penerima DPM

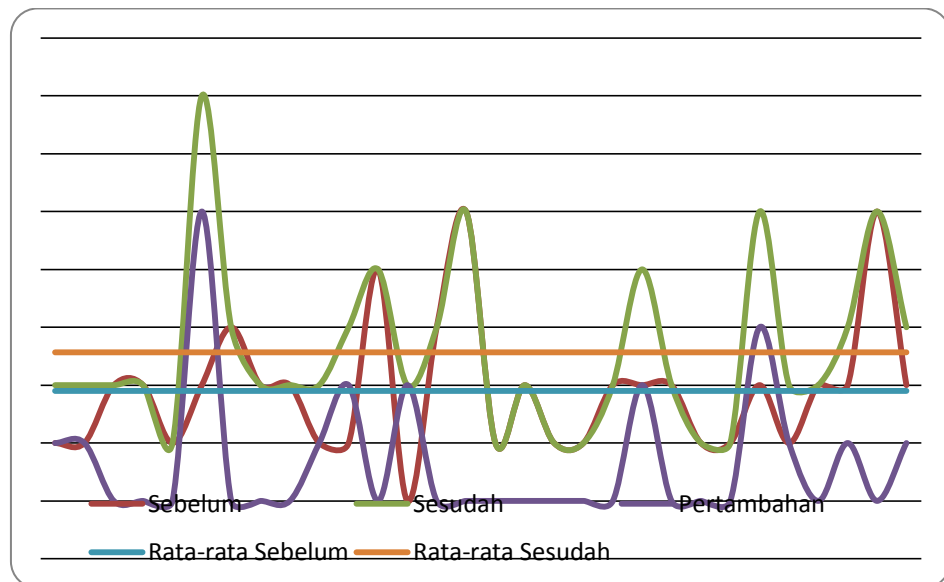
No	Periode	Rata-rata	Terendah	Tertinggi
1	Sebelum	1.910.426,00	90.000,00	10.000.000,00
2	Sesudah	3.323.191,00	400.000,00	16.000.000,00
3	Pertumbuhan	1.355.102,04	0	11.350.000,00
		169,59%	7%	1.111,11%

Sumber: Data primer yang diolah

Rata-rata modal usaha penerima DPM sebelum menerima dana pinjaman adalah Rp1.910.426,00 dan rata-rata modal usaha penerima DPM setelah mendapatkan dana pinjaman adalah Rp3.323.191,00. Terjadi kenaikan rata-rata modal usaha dari sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Kenaikan rata-rata yang terjadi sejumlah Rp1.412.765,00. Penerima DPM rata-rata mengalami pertambahan modal usaha sebesar Rp1.355.102,04 atau setara dengan 169,59%.

b. Peningkatan Tenaga Kerja

Berikut ini merupakan gambar grafik perubahan tenaga kerja penerima DPM.



Gambar 8. Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Menerima DPM

Sedangkan ringkasan perubahan tenaga kerja penerima DPM dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Data secara lengkap ada di lampiran.

Tabel 16. Perubahan dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Penerima DPM

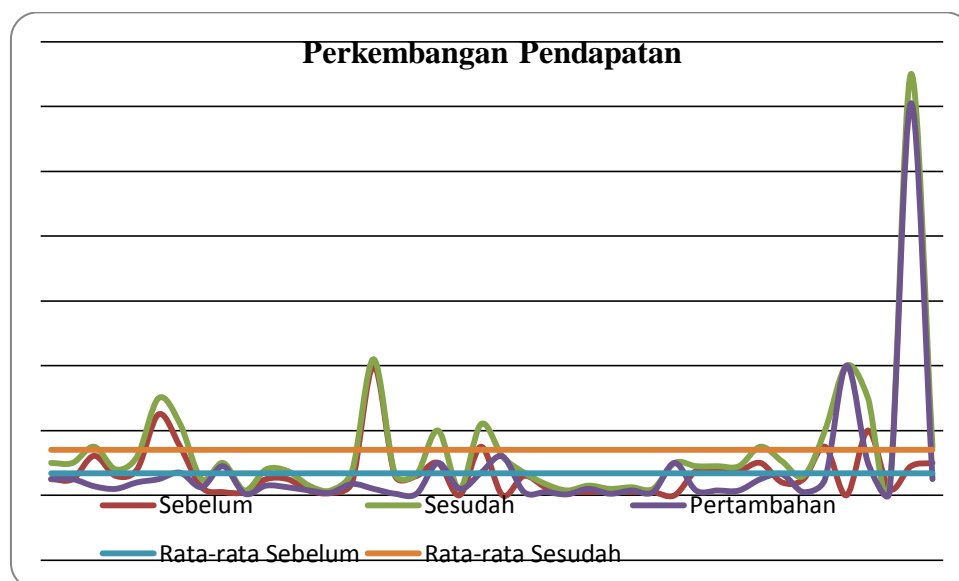
No.	Periode	Rata-rata	Terendah	Tertinggi
1	Sebelum	2	0	5
2	Sesudah	3	1	7
3	Pertumbuhan	0,67	0	5
		41,38%	0	250%

Sumber: Data primer yang diolah

Rata-rata tenaga kerja penerima DPM sebelum menerima dana pinjaman adalah 2 orang dan rata-rata penerima DPM setelah mendapatkan dana pinjaman adalah 3 orang. Terjadi kenaikan rata-rata tenaga kerja dari sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Kenaikan rata-rata yang terjadi sejumlah 1 orang. Penerima DPM mengalami pertumbuhan jumlah tenaga kerja rata-rata 0,67 orang atau setara dengan 41,38%.

c. Peningkatan Pendapatan

Berikut ini merupakan gambar grafik perubahan pendapatan usaha penerima DPM.



Gambar 9. Pendapatan Sebelum dan Sesudah Menerima DPM

Sedangkan ringkasan perubahan pendapatan usaha penerima DPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data secara lengkap ada di lampiran.

Tabel 17. Perubahan dan Pertumbuhan Pendapatan Penerima DPM

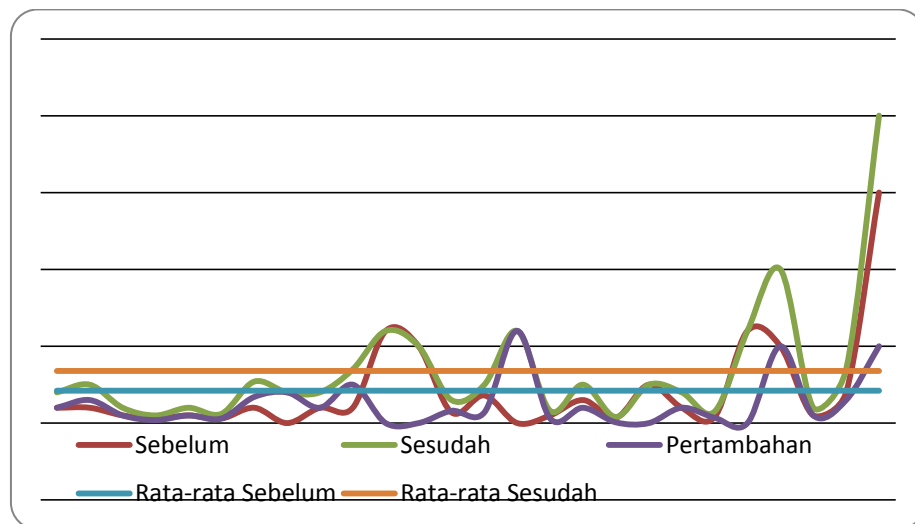
No	Periode	Rata-rata	Terendah	Tertinggi
1	Sebelum	680.000,00	0	4.000.000,00
2	Sesudah	1.404.762,00	150.000,00	13.000.000,00
3	Pertumbuhan	724.762,00	30.000,00	12.100.000,00
		115%	5%	134%

Sumber: Data primer yang diolah

Rata-rata pendapatan penerima DPM sebelum menerima dana pinjaman adalah Rp680.000,00 orang dan rata-rata pendapatan penerima DPM setelah mendapatkan dana pinjaman adalah Rp1.404.762,00 orang. Terjadi kenaikan rata-rata pendapatan dari sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Kenaikan rata-rata yang terjadi sejumlah Rp724.762,00. Penerima DPM mengalami pertumbuhan jumlah modal usaha sebesar rata-rata Rp724.762,00 orang atau setara dengan 115%.

d. Peningkatan Asset yang Dimiliki

Berikut ini merupakan gambar grafik perubahan asset usaha penerima DPM.



Gambar 10. Asset Sebelum dan Sesudah Menerima DPM

Sedangkan ringkasan perubahan asset usaha penerima DPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data secara lengkap ada di lampiran.

Tabel 18. Perubahan dan Pertumbuhan Asset Penerima DPM

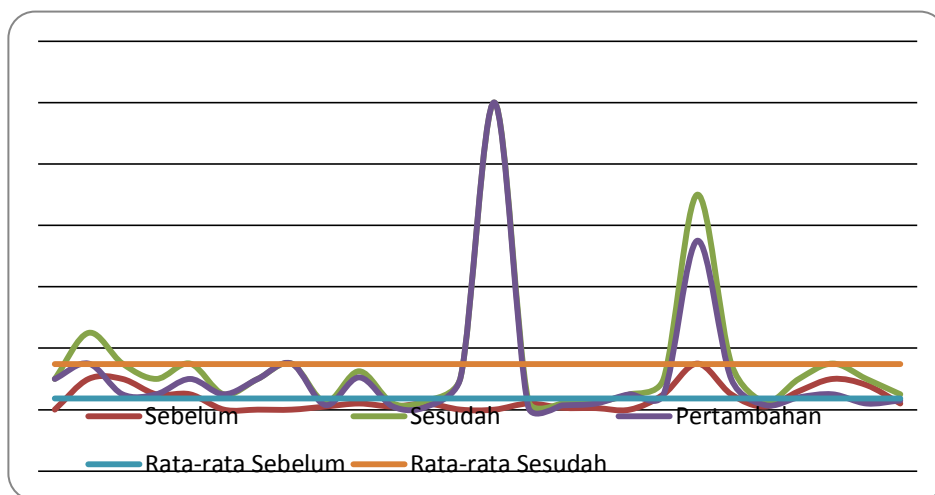
No	Periode	Rata-rata	Terendah	Tertinggi
1	Sebelum	2.109.615,00	0	15.000.000,00
2	Sesudah	3.394.231,00	250.000,00	20.000.000,00
3	Pertumbuhan	1.284.615,00	0	6.000.000,00
		80%	0%	250%

Sumber: Data primer yang diolah

Rata-rata asset penerima DPM sebelum menerima dana pinjaman adalah Rp2.109.615,00 dan rata-rata asset penerima DPM setelah mendapatkan dana pinjaman adalah Rp3.394.231,00. Terjadi kenaikan rata-rata asset dari sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Kenaikan rata-rata yang terjadi sejumlah Rp1.284.616,00. Penerima DPM mengalami pertumbuhan jumlah asset rata-rata sebesar Rp1.284.615 atau setara dengan 80%.

e. Peningkatan Tabungan

Berikut ini merupakan gambar grafik perubahan tabungan usaha penerima DPM.



Gambar 11. Tabungan Sebelum dan Sesudah Menerima DPM

Sedangkan ringkasan perubahan tabungan penerima DPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data secara lengkap ada di lampiran.

Tabel 19. Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Tabungan Penerima DPM

No	Periode	Rata-rata	Terendah	Tertinggi
1	Sebelum	479.474,00	0	1.500.000,00
2	Sesudah	1.482.885,00	200.000,00	10.000.000,00
3	Pertumbuhan	1.132.500,00	100.000,00	10.000.000,00
		164%	25%	525%

Sumber: Data primer yang diolah

Rata-rata tabungan penerima DPM sebelum menerima dana pinjaman adalah Rp479.474,00 dan rata-rata tabungan penerima DPM setelah mendapatkan dana pinjaman adalah Rp1.482.885,00. Terjadi kenaikan rata-rata tabungan dari sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Kenaikan rata-rata yang terjadi sejumlah Rp1.003.411,00.

Penerima DPM mengalami pertumbuhan jumlah tabungan rata-rata sebesar Rp1.132.500 atau setara dengan 164%.

f. Pertumbuhan Usaha Penerima DPM dan Angka Inflasi

Di bagian sebelumnya sudah dipaparkan perkembangan usaha penerima DPM yang meliputi perkembangan modal usaha, tenaga kerja, pendapatan, asset, dan tabungan. Hasilnya secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 20. Perkembangan Usaha Penerima DPM

No	Bidang	Pertumbuhan Rata-rata (%)
1	Modal usaha	169,59
2	Tenaga kerja	41,38
3	Pendapatan	115
4	Asset	80
5	Tabungan	164
Rata-rata		113,994

Sumber: Data primer yang diolah

Perkembangan modal usaha penerima DPM mengalami kenaikan sebesar 169.59%, tenaga kerja naik sebesar 41,38%, pendapatan usaha naik 115%, Asset juga mengalami kenaikan sebesar 80%, sedangkan tabungan mengalami kenaikan sebesar 164%. Secara keseluruhan, rata-rata perkembangan usaha penerima DPM adalah 113,994%. Angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka inflasi di Indonesia tahun 2013 yang berada dikisaran 6,97%.

5. Permasalahan dan Kendala

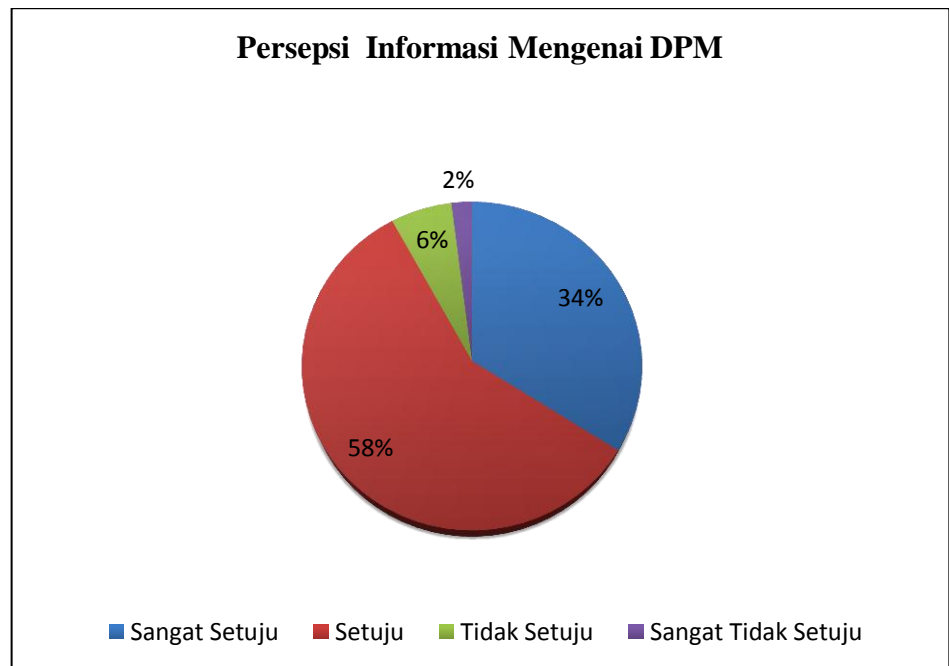
Permasalahan dan kendala mungkin dihadapi oleh penerima dana penguatan modal. Kendala yang dimaksud di sini meliputi kendala yang berasal dari penerima DPM itu sendiri maupun kendala yang berasal dari

pihak lain berkaitan dengan prosedur dan pelayanan DPM. Permasalahan dan kendala tersebut diklasifikasikan ke dalam:

a. Kendala Pencairan Dana

Kendala dalam pencairan dana meliputi ketersediaan informasi, prosedur pengajuan pinjaman, dan juga proses dari pencairan dana itu sendiri. Berdasarkan data dari responden yang berhasil dikumpulkan diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Informasi mengenai DPM



Gambar 12. Persepsi Responden terhadap Informasi Mengenai DPM

Berdasarkan hasil angket yang diperoleh mayoritas responden menyatakan setuju bahwa informasi mengenai DPM mudah diperoleh. Bahkan 34% dari mereka menyatakan sangat setuju. Dengan mudahnya informasi mengenai DPM akan

mempermudah akses masyarakat yang ingin mengajukan DPM. Selanjutnya peneliti berusaha menggali informasi darimana sumber informasi DPM diperoleh para responden. Tabel berikut menampilkan hasil sumber informasi mengenai DPM.

Tabel 22. Persepsi Sumber Informasi DPM

No.	Sumber Informasi	Responden	Prosentase %
1	Teman/Tetangga	5	10
2	Staff KP3M	11	22
3	Leaflet/selebaran/buletin	8	16
4	Pengumuman media masa	-	-
5	Petugas PLKB	24	48
6	Tidak mengisi	3	6
	Jumlah	50	100

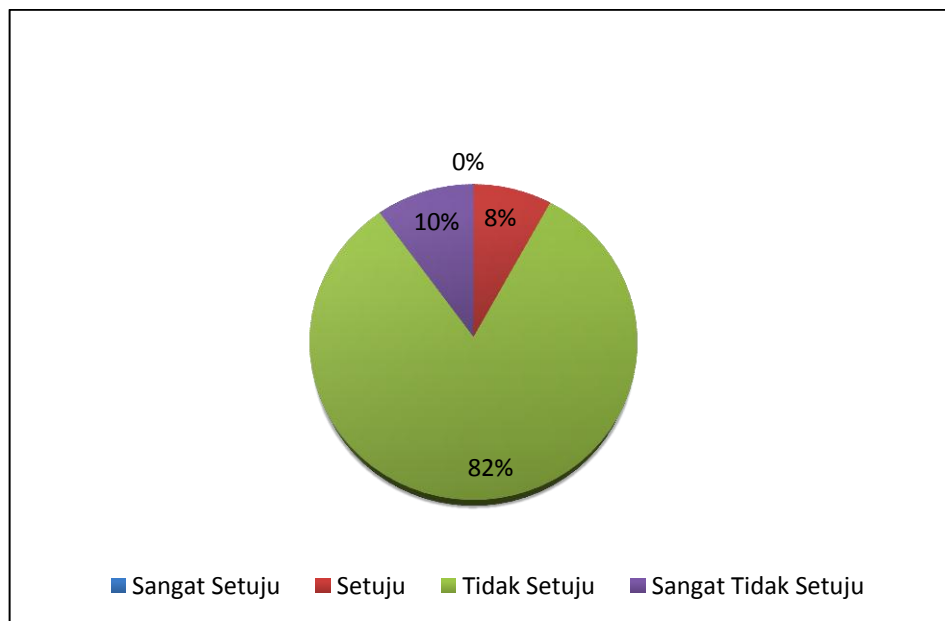
Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sumber informasi DPM responden terbanyak ialah dari petugas PLKB yaitu 24 orang atau 48%, terbanyak kedua ialah dari staff KP3M yaitu 11 orang atau 22%, selanjutnya responden memperoleh informasi dari leaflet/selebaran/buletin sebanyak 8 orang atau 16%, dari teman/tetangga sebanyak 5 orang atau 10%.

Responden penelitian ini merupakan anggota dari kelompok UPPKS dan UP2K, sehingga sebagian besar dari mereka menerima informasi mengenai DPM dari petugas PLKB yang mendampingi mereka.

2) Prosedur pengajuan DPM

Setelah memperoleh informasi, proses selanjutnya ialah pengajuan DPM. Berikut ini merupakan persepsi responden terhadap proses pengajuan DPM.



Gambar 13. Persepsi Responden Terhadap Proses Pengajuan DPM

Sebagian besar responden menyatakan tidak setuju bahwa prosedur pengajuan DPM berbelit-belit. Mereka beranggapan bahwa prosedur pencairan DPM yang sudah berjalan saat ini sudah baik dan mudah. Pihak KP3M dan dinas-dinas terkait pun terbuka dan sangat membantu penerima DPM dalam proses pencairan. Dari 50 responden hanya 4 orang atau 8% responden yang menyatakan prosedur pengajuan DPM berbelit-belit. Melalui wawancara kemudian diketahui mereka memiliki kesulitan dalam penyusunan proposal pengajuan DPM dan mereka mengharapkan adanya

panduan yang akan lebih memudahkan mereka dalam penyusunan proposal pengajuan DPM.

b. Kendala Pemanfaatan Dana

Bentuk kendala pemanfaatan dana pinjaman yang dialami oleh pengusaha antara lain adalah:

1) Jumlah pinjaman belum mencukupi

Jumlah pinjaman yang diterima oleh anggota UPPKS dan UP2K berkisar antara Rp500.000,00 sampai Rp5.000.000,00. Akan tetapi, hanya 12% dari mereka yang menerima pinjaman lebih dari Rp2.000.000,00. Dengan demikian jumlah pinjaman yang diterima kurang mencukupi dan kurang bermakna dalam investasi.

2) Kurangnya pengetahuan manajerial dan keuangan

Disamping besarnya pinjaman, bagaimana cara pemanfaatan DPM juga penting untuk diperhatikan para penerimanya. Sebagian besar responden tidak memiliki dasar pengetahuan manajerial dan keuangan. Pembukuan pun tidak dilakukan, hanya sebagian dari mereka yang melakukan pembukuan sederhana. Selain itu, pemasaran mereka juga terbatas. Meskipun mereka mendapat tambahan modal untuk menambah produksi, akan tetapi penambahan produksi ini tidak dibarengi dengan perluasan pasar.

c. Kendala Pengembalian Dana

Jangka waktu pengembalian pinjaman DPM antara 1 (satu) atau 2 (dua) tahun. Kendala dalam pengembalian dana bisa terjadi karena

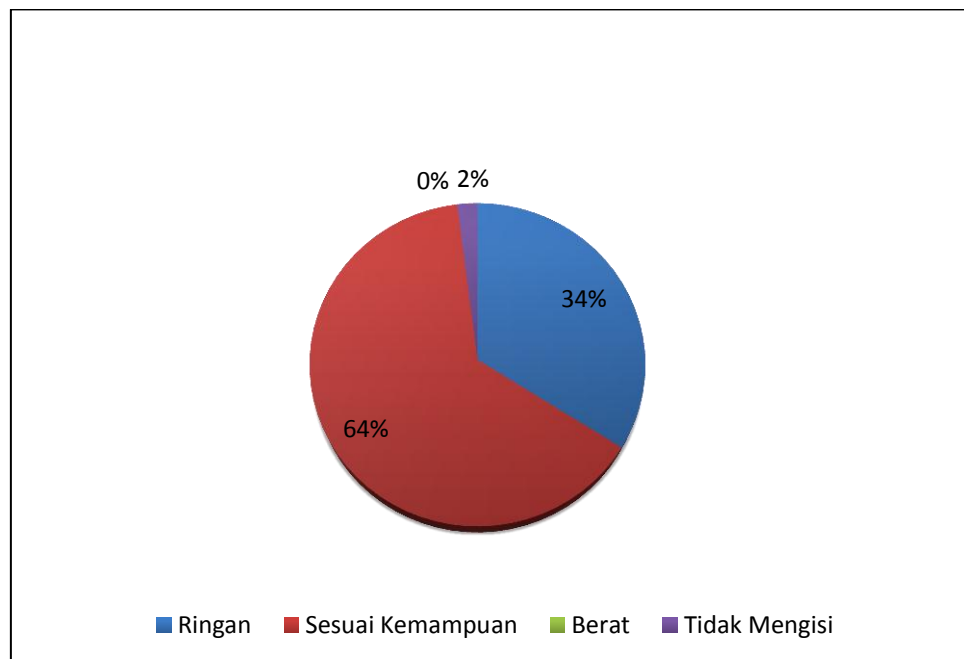
tingkat bunga atau kontribusi yang terlalu tinggi, besarnya angsuran yang memberatkan, dan juga permasalahan dari pengusaha itu sendiri baik itu permasalahan keluarga maupun masalah lain yang berkaitan dengan usaha. Berikut ini data angsuran DPM dalam satuan Rupiah.

Tabel 23. Data Angsuran DPM

Angsuran Terendah	Modus	Angsuran Rata-rata	Angsuran Tertinggi
25.000	55.000	130.541,7	500.000

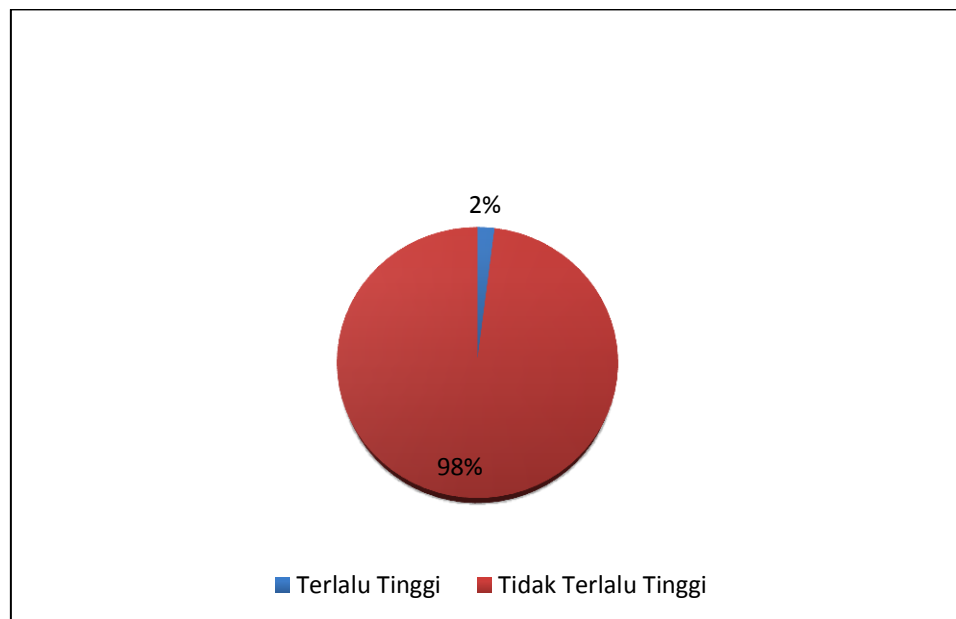
Sumber: Data primer yang diolah

Angsuran terendah Rp25.000,00 dan angsuran tertinggi Rp500.000,00. Jumlah angsuran dibayarkan oleh responden terbanyak adalah Rp55.000,00. Sedangkan rata-rata angsuran DPM ialah Rp130.541,70. Selain jumlah angsuran, peneliti juga menggali informasi mengenai persepsi responden terhadap jumlah angsuran yang dibayarkan. Hasil survei persepsi responden terhadap jumlah angsuran yang dibayarkan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 14. Persepsi Responden Terhadap Jumlah Angsuran

Hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa 32 orang atau 64% responden menyatakan bahwa jumlah angsuran yang harus mereka bayarkan sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan 17 orang atau 34% diantaranya menyatakan jumlah yang harus mereka bayar termasuk dalam kategori ringan dan tidak ada responden yang menyatakan jumlah angsuran yang harus mereka bayarkan berat. Selain angsuran, penerima DPM juga berkewajiban untuk membayar kontribusi atau dikenal dengan istilah bunga. Di bawah ini persepsi responden mengenai besarnya kontribusi yang dikenakan terhadap mereka.



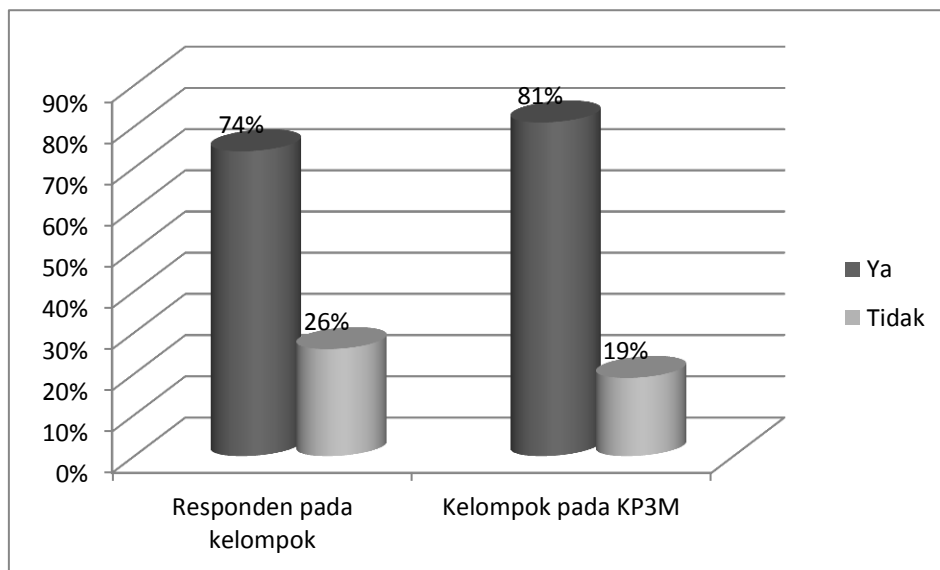
Gambar 15. Persepsi Besarnya Kontibusi DPM

Berdasarkan hasil dari penyebaran angket, diketahui bahwa 98% dari responden yakni 49 orang menyatakan bahwa beban kontribusi yang dibebankan pada penerima DPM tidak terlalu tinggi. Menurut mereka kontribusi yang diterapkan DPM masih lebih rendah dari kontribusi (bunga) yang diterapkan pada pinjaman lain, misal pinjaman dari bank.

Hasil di atas memperlihatkan bahwa jumlah angsuran dan beban kontribusi DPM besarnya sesuai dengan kemampuan responden dan tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, seharusnya tingkat pengembalian DPM prosentasenya tinggi. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat dana DPM yang beredar di masyarakat atau dengan kata lain menjadi tunggakan. Jumlah dana tunggakan DPM hingga semester ke-II tahun 2013 mencapai Rp41.000.092.681,00 atau

21,63%. Jumlah tunggakan DPM dari kelompok UPPKS dan UP2K sebanyak 39,81%.

Masih adanya dana yang menjadi tunggakan disebabkan oleh keterlambatan angsuran dari penerima DPM itu sendiri. Meskipun angsuran dan kontribusi yang harus dibayarkan jumlahnya sesuai dengan kemampuan, kenyataannya masih ada yang terlambat dalam pengembalian dana. Peneliti mensurvei ketepatan penerima DPM dalam mengangsur pinjaman. Hasilnya dapat dilihat dalam diagram berikut.



Gambar 16. Persepsi Ketepatan Membayar Angsuran

Penerima DPM membayar angsuran kepada masing-masing kelompok, kemudian kelompok secara kolektif menyetorkan angsuran kelompok ke rekening KP3M. Dari tabel di atas diperoleh data 26% penerima DPM membayarkan angsuran kepada kelompok tidak tepat waktu. Akibatnya kelompok-pun terlambat membayar angsuran kepada KP3M. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat keterlambatan kelompok

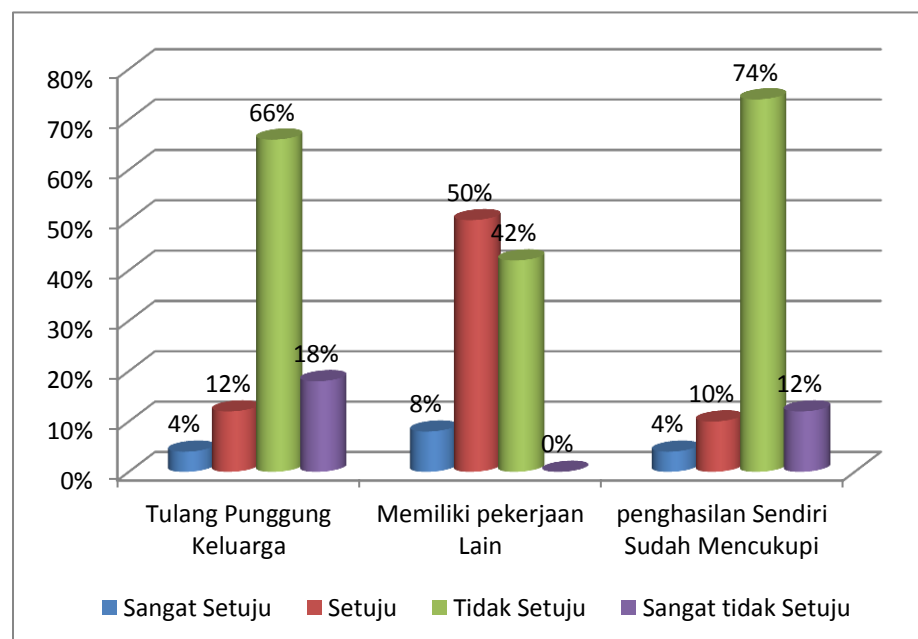
dalam membayar angsuran kepada KP3M sebanyak 18%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa keterlambatan pengembalian dana DPM dari kelompok kepada KP3M dipengaruhi oleh keterlambatan pengembalian oleh anggota.

6. Peran Perempuan Pemilik Usaha

Responden dalam penelitian ini merupakan perempuan-perempuan yang memiliki tiga peran yakni sebagai ibu rumah tangga, pengusaha, sekaligus sebagai anggota kelompok UPPKS dan UP2K. Selanjutnya, peran perempuan pemilik usaha ini akan dibahas lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian berikut:

a. Peran Dalam Perekonomian Keluarga

Berikut ini hasil survei mengenai peran responden dalam ekonomi keluarga yang disajikan dalam diagram.



Gambar 17. Peran Responden dalam Ekonomi Keluarga

1) Sebagai Tulang Punggung Keluarga

Dalam tabel di atas disebutkan bahwa 8 orang atau 16% responden merupakan tulang punggung keluarga. Berdasarkan karakteristik responden dalam penelitian ini responden yang berstatus janda ada 3 orang. Akan tetapi setelah dilakukan pencocokan data, justru ke-3 orang responden ini bukan merupakan tulang punggung keluarga. Peran istri lazimnya membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Disini terjadi ketidaksesuaian dimana responden yang masih berstatus memiliki suami justru menjadi tulang punggung keluarga mengambil alih tugas suami.

2) Memiliki Pekerjaan Lain

Berdasarkan tabel di atas sebanyak 29 orang responden menyatakan memiliki pekerjaan lain selain menjalankan usaha yang dibiayai dengan DPM. Sedangkan 21 orang lainnya menyatakan tidak memiliki pekerjaan lain selain menjalankan usahanya tersebut. Data tersebut dapat diartikan bahwa penghasilan responden dari usaha tidak cukup berarti untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu dapat juga diartikan responden ini menjalani pekerjaan lain maupun usaha ini hanya sebagai hobi atau pengisi waktu luang saja.

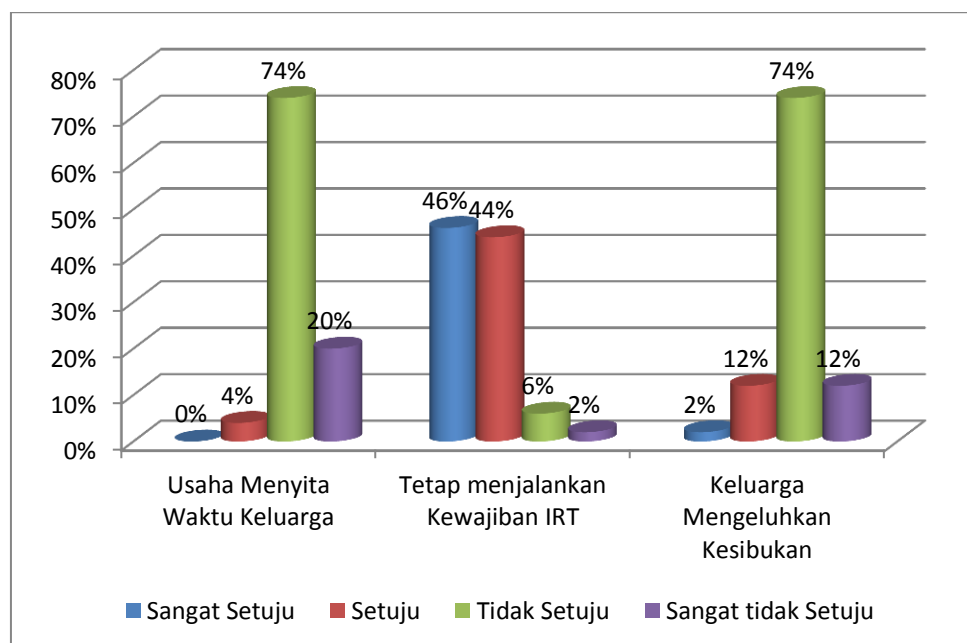
3) Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari

Sesuai dengan tabel di atas, responden hanya sejumlah 7 orang yang menyatakan bahwa penghasilan responden sendiri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan dengan data bahwa

29 responden memiliki pekerjaan lain selain usaha yang dijalankan dengan DPM hanya 14% dari responden yang penghasilannya sendiri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi sisanya 36% responden ini selain tambahan modal masih diperlukan bantuan lebih jauh untuk dapat mengembangkan usahanya.

b. Peran Sebagai Ibu Rumah Tangga

Berikut ini hasil survei mengenai peran responden sebagai ibu rumah tangga yang disajikan dalam diagram berikut:



Gambar 18. Peran Responden dalam Keluarga

1) Usaha menyita waktu untuk keluarga

Persepsi responden mengenai menjalankan usaha menyita waktu untuk keluarga hanya 2 orang responden yang menyatakan setuju. Sisanya menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Artinya waktu untuk mengurus usaha dan keluarga terbagi dengan seimbang.

2) Kewajiban sebagai Ibu rumah tangga

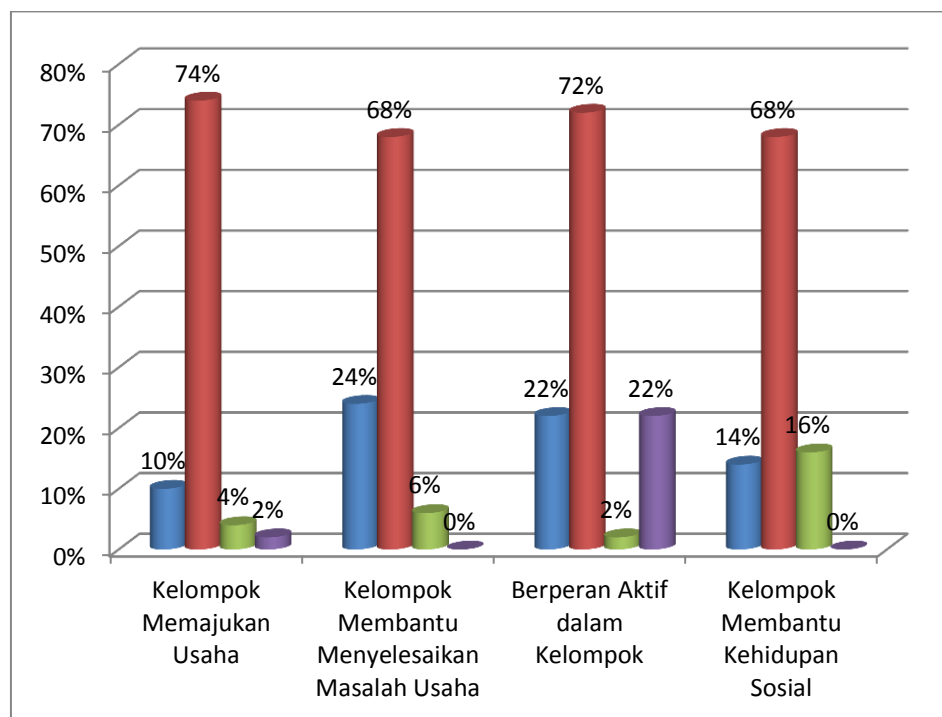
Berkaitan dengan pernyataan sebelumnya bahwa waktu untuk mengurus keluarga dan usaha haruslah dibagi secara bijaksana mengingat selain sebagai pengusaha responden memiliki tugas utama, yakni sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban utama ibu rumah tangga adalah mengurus keluarga. Berdasarkan hasil penelitian 45 responden menyatakan setuju dan sangat setuju dan hanya 4 responden yang menyatakan tidak setuju bahwa disamping mengelola usaha mereka tetap melakukan kewajibannya mengurus keluarga.

3) Keluhan dari keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7 orang responden setuju dan sangat setuju dengan pernyataan bahwa ada keluhan dari keluarga karena responden terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengurus usaha. Sementara 43 responden lainnya menyatakan tidak ada keluhan. Bahwa meski tetap melakukan kewajiban sebagai ibu rumah tangga disamping mengelola usaha, masih adanya keluhan dari anggota keluarga menandakan besarnya ketergantungan keluarga kepada sosok Ibu.

c. Peran Sebagai Anggota Kelompok UPPKS dan UP2K

Berikut ini hasil survei mengenai peran sebagai anggota kelompok UPPKS dan UP2K yang disajikan dalam diagram



Gambar 19. Peran Responden Sebagai Anggota Kelompok

1) Kelompok dan kemajuan usaha

Berdasarkan hasil yang diperoleh, responden yang setuju dan sangat setuju dengan pernyataan bahwa kelompok UPPKS/UP2K berkontribusi terhadap kemajuan usaha ada sebanyak 47 orang responden. Terhadap pernyataan bahwa antar sesama anggota UPPKS/UP2K dapat saling berbagi dalam mengatasi permasalahan usaha sebanyak 46 responden menyatakan setuju dan sangat setuju.

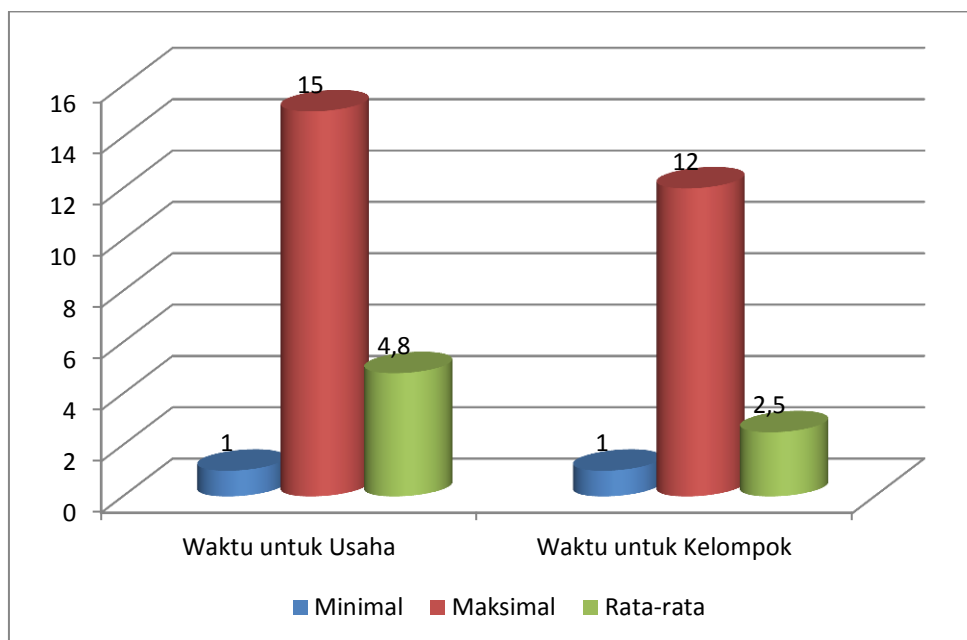
2) Kelompok dan kehidupan sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47 atau 94% responden menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa mereka berperan aktif dalam kelompok UPPKS/UP2K. Dalam kelompok, antar anggota saling berbagi dalam mengatasi permasalahan mengenai keluarga

maupun lingkungan, responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju dengan pernyataan tersebut ada sebanyak 41 orang.

d. Waktu yang Dhabiskan untuk Usaha dan Kelompok

Hasil survei terhadap responden mengenai waktu yang dihabiskan untuk usaha dan kelompok disajikan dalam diagram berikut ini.



Gambar 20. Alokasi waktu Responden untuk Usaha dan Kelompok

1) Waktu yang dihabiskan untuk usaha

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan responden untuk mengelola usaha dalam satu hari adalah 4,8 jam. Waktu minimal 1 jam/hari dan maksimal selama 15 jam/hari. Sedangkan dalam satu minggu, responden rata-rata menghabiskan waktu untuk mengelola usaha sebanyak 33,6 jam dari total 168 jam dalam satu minggu.

2) Waktu yang dihabiskan untuk kelompok

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan responden untuk berkegiatan dalam kelompok UPPKS/UP2K dalam satu minggu adalah 2,5 jam. Waktu minimal 1 jam/minggu dan maksimal selama 12 jam/minggu.

Alokasi waktu total responden selama satu minggu yaitu 168 jam. Sebanyak 20% atau 33,6 jam untuk mengelola usaha, 1,49% atau 2,5 jam untuk berkegiatan dalam kelompok, dan sisanya 78,51% untuk keluarga, diri sendiri dan lain-lain.

B. Pembahasan Penelitian

1. Manfaat dari Penerimaan Dana Penguatan Modal

Manfaat merupakan hal positif yang diperoleh oleh kelompok UPPKS dan UP2K yang menerima pinjaman dana penguatan modal setelah menerima dana pinjaman tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DPM bermanfaat bagi penerima. Hal tersebut dinyatakan oleh mayoritas responden yakni sebanyak 94% responden.

Kemanfaatan DPM bagi penerimanya akan menghasilkan perubahan positif yang dialami setelah menerima DPM meliputi perubahan positif dalam hal perkembangan usaha maupun perkembangan dari sisi ekonomi keluarga, yakni meningkatnya kesejahteraan keluarga. Penggunaan DPM pada usaha menambah kinerja usaha. Dengan meningkatnya kinerja usaha, maka akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi keluarga.

Menilai kemanfaatan DPM bagi pelaku usaha perempuan di Kabupaten Sleman perlu juga melihat ketercukupan jumlah pinjaman yang diterima dengan jumlah yang dibutuhkan pelaku usaha. Berdasarkan data jumlah pinjaman yang diterima, tiap pelaku usaha menerima pinjaman antara Rp500.000,00 sampai Rp5.000.000,00. Hasil penelitian menunjukkan 56% responden menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang diterima sudah mencukupi kebutuhan mereka. Sedangkan sisanya menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang diterima belum atau tidak mencukupi kebutuhan mereka. Ketidacukupan yang dirasakan disebabkan ketimpangan antara jumlah pinjaman yang diterima kelompok dengan jumlah anggota dalam kelompok, jumlah pinjaman yang diterima tiap anggota nominalnya kecil sehingga kurang bermakna sebagai investasi.

Kemanfaatan DPM juga dapat dilihat dari pengalokasian dana oleh penerimanya. Tujuan pemberian DPM ialah untuk membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya sehingga kesejahteraan keluarganya juga menjadi lebih baik. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan bisa terjadi penyelewengan, dana DPM dipergunakan bukan untuk tujuan produktif melainkan untuk kegiatan konsumsi.

Dari 50 orang responden, menurut data yang diperoleh sebanyak 96% memanfaatkan dana DPM untuk kegiatan produktif yaitu menambah modal kerja dan membeli asset. Hal ini sesuai dengan tujuan DPM, yakni diperuntukkan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usaha. Akan tetapi, hanya 36% responden yang murni memanfaatkan DPM untuk

kegiatan produktif atau menginvestasikan dalam usaha. Sisanya yaitu 64% selain memanfaatkan DPM untuk kegiatan produktif juga menggunakannya untuk pengeluaran lain yakni biaya sekolah anak, biaya berobat, konsumsi sehari-hari, pengeluaran sosial (nyumbang, membantu saudara, dll), membayar hutang, serta pengeluaran lainnya. Pengeluaran lain diluar untuk usaha produktif ini akan mempengaruhi kemanfaatan dari DPM. Pengeluaran diluar untuk usaha produktif akan mengurangi jumlah dana yang dialokasikan untuk usaha. Semakin banyak pengeluaran untuk keperluan diluar usaha maka semakin sedikit nominal dana yang dialokasikan untuk usaha dan sebaliknya. Semakin sedikit dana yang dialokasikan untuk usaha maka semakin kecil perubahan yang akan dirasakan dari usaha tersebut sehingga akan mengurangi kemanfaatan dari dana tersebut.

2. Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Dana Penguatan Modal

Adanya DPM bagi pelaku usaha memberikan manfaat dalam hal perkembangan usaha penerima. Menerima DPM berarti mendapat tambahan modal dan kesempatan untuk memajukan usaha yang dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian, DPM membawa manfaat positif bagi usaha penerima. Manfaat positif tersebut berupa perkembangan dalam jumlah modal usaha, tenaga kerja, pendapatan, asset, dan tabungan. Berikut ini tabel yang memuat ringkasan perkembangan usaha penerima DPM.

Tabel 24. Perkembangan Usaha Penerima DPM

No	Aspek	Rata-rata Sebelum	Rata-rata Sesudah	Rata-rata Pertumbuhan (nominal)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Modal Usaha	1.910.426,00	3.323.191,00	1.355.102,04	169,59
2	Tenaga Kerja	2	3	0,67	41,38
3	Pendapatan	680.000,00	1.404.762,00	724.762,00	115
4	Asset	2.109.615,00	3.394.231,00	1.284.615,00	80
5	Tabungan	479.474,00	1.482.885,00	1.132.500,00	164

Sumber: Data primer yang diolah

Perkembangan terbesar terjadi pada modal usaha dan tabungan yang nilainya melebihi 150%. Sedangkan kenaikan pada tenaga kerja dan asset kurang dari 100%. Kenaikan modal usaha memiliki prosentase tertinggi, karena penerima DPM menggunakan dana yang diterimanya sebagai modal usaha. Terkait dengan peningkatan tenaga kerja, dapat dikatakan bahwa skala usaha penerima DPM kelompok UPPKS/UP2K merupakan usaha kecil yang tidak membutuhkan banyak karyawan bahkan hanya menggunakan tenaga yang berasal dari keluarga sendiri. Kenaikan pendapatan sebanyak 115%. Kenaikan asset hanya 80% disebabkan usaha yang berskala kecil memang tidak membutuhkan asset yang besar. Artinya dengan skala produksi yang tidak terlalu besar maka peralatan yang dibutuhkan juga peralatan yang relatif sederhana dan tidak dalam jumlah

besar. Hal ini bisa membuat keuntungan usaha yang diperoleh penerima DPM selanjutnya dapat dialokasikan untuk menambah modal usaha dan tabungan. Seperti hasil yang ditunjukkan pertumbuhan modal usaha dan tabungan merupakan dua terbesar.

Secara keseluruhan, rata-rata perkembangan usaha penerima DPM adalah 113,994%. Angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka inflasi di Indonesia yang berada dikisaran 6,97% .

7. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala sangat mungkin dihadapi oleh penerima dana penguatan modal. Kendala yang dimaksud di sini meliputi kendala yang berasal dari penerima DPM itu sendiri maupun kendala yang berasal dari pihak lain berkaitan dengan prosedur dan pelayanan DPM. Permasalahan dan kendala tersebut diklasifikasikan ke dalam:

a. Kendala Pencairan Dana

Berdasarkan hasil angket yang diperoleh, mayoritas responden menyatakan setuju bahwa informasi mengenai DPM mudah diperoleh. Bahkan 34% dari mereka menyatakan sangat setuju. Dengan mudahnya informasi mengenai DPM didapatkan akan mempermudah akses masyarakat yang ingin mengajukan DPM.

Responden penelitian ini merupakan anggota dari kelompok UPPKS dan UP2K, Sehingga sebagian besar dari mereka menerima informasi mengenai DPM dari PLKB atau Penyuluh Lapangan

Keluarga Berencana yang bertugas mendampingi mereka. Sumber lainnya ialah dari staff KP3M.

Setelah memperoleh informasi, proses selanjutnya ialah pengajuan DPM. Mereka beranggapan bahwa prosedur pencairan DPM yang sudah berjalan saat ini sudah baik dan mudah. Pihak KP3M dan Dinas-dinas terkait pun terbuka dan sangat membantu penerima DPM dalam proses pencairan. Melalui wawancara kemudian diketahui mereka memiliki kesulitan dalam penyusunan proposal pengajuan DPM dan mereka mengharapkan adanya panduan yang akan lebih memudahkan mereka dalam penyusunan proposal pengajuan DPM.

b. Kendala pemanfaatan dana

Kendala pemanfaatan dana pinjaman yang dialami oleh pengusaha yaitu, jumlah pinjaman yang diterima ini kurang mencukupi dan kurang bermakna dalam investasi. Mengenai persepsi ketercukupan jumlah pinjaman hanya 56% responden yang menyatakan jumlah pinjaman yang diterima mencukupi. Dalam rangka memperoleh manfaat dari penggunaan, disamping besarnya pinjaman, bagaimana cara pemanfaatan juga berpengaruh dalam menghasilkan manfaat yang optimal. Sebagian besar responden ini tidak memiliki dasar pengetahuan manajerial dan keuangan. Pembukuan pun tidak dilakukan, hanya sebagian dari mereka yang melakukan pembukuan secara sederhana. Selain itu, pengetahuan tentang pemasaran juga terbatas. Dengan demikian meskipun mereka mendapat tambahan

modal untuk menambah produksi, akan tetapi perubahan yang diraskan tidak akan maksimal.

c. Kendala pengembalian dana

Hasil dari penyebaran angket menunjukkan bahwa 64% responden menyatakan bahwa jumlah angsuran yang harus mereka bayarkan sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan 34% diantaranya menyatakan jumlah yang harus mereka bayar termasuk dalam kategori ringan dan tidak ada responden yang menyatakan jumlah angsuran yang harus mereka bayarkan berat. Sehingga jumlah angsuran bukan merupakan kendala bagi penerima DPM.

Hasil dari penyebaran angket mengenai kontribusi, diketahui bahwa 98% dari responden menyatakan bahwa beban kontribusi yang dibebankan pada penerima DPM tidak terlalu tinggi. Menurut mereka kontribusi yang diterapkan DPM masih lebih rendah dari kontribusi (bunga) yang diterapkan pada pinjaman lain, misal pinjaman dari bank.

Dana DPM masih ada yang beredar di masyarakat atau dengan kata lain menjadi tunggakan. Jumlah dana tunggakan DPM hingga semester ke-II tahun 2013 mencapai Rp41.000.092.681,00 atau 21,63%. Jumlah tunggakan DPM dari kelompok UPPKS dan UP2K sebanyak 39,81%.

Masih adanya dana yang menjadi tunggakan disebabkan oleh keterlambatan angsuran dari penerima DPM itu sendiri. Meskipun angsuran dan kontribusi yang harus dibayarkan jumlahnya sesuai

dengan kemampuan, kenyataannya masih ada yang terlambat dalam pengembalian dana.

Dari hasil penelitian diperoleh data 26% penerima DPM membayarkan angsuran kepada kelompok tidak tepat waktu. Akibatnya kelompok-pun terlambat membayar angsuran kepada KP3M. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat keterlambatan kelompok dalam membayar angsuran kepada KP3M sebanyak 18%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa keterlambatan pengembalian dana DPM dari kelompok kepada KP3M dipengaruhi oleh keterlambatan pengembalian oleh anggota. Faktornya yaitu, ada beberapa anggota yang menyepelekan DPM karena merupakan dana dari pemerintah bahkan ada yang beranggapan tidak perlu mengembalikan, serta kegagalan dalam usaha yang dijalankan anggota sehingga mengalami kesulitan dalam mengembalikan dana.

8. Kontribusi Perempuan Pemilik Usaha

Peranan atau kontribusi perempuan anggota UPPKS dan UP2K penerima dana DPM dalam mendukung ekonomi keluarga, yakni dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 47 orang dari responden penelitian ini berstatus menikah dan 3 orang lainnya merupakan janda. Bagi responden yang sudah menikah penghasilan dari usaha tentunya bukan merupakan sumber pendapatan utama karena masih dapat mengandalkan penghasilan suami. Berbeda

halnya dengan responden yang berstatus janda yang secara otomatis merupakan sumber utama pemasukan keluarga.

Responden dalam penelitian ini merupakan perempuan-perempuan yang memiliki tiga profesi yakni sebagai ibu rumah tangga, pengusaha, sekaligus sebagai anggota kelompok UPPKS dan UP2K. Selanjutnya, kontribusi perempuan pemilik usaha ini akan dibahas lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian berikut:

a. Peran dalam Perekonomian Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% responden merupakan tulang punggung atau satu-satunya yang memiliki penghasilan dalam keluarga mereka. Mayoritas responden bukan merupakan sumber pendapatan utama bagi keluarga. Akan tetapi, 16% responden tersebut merupakan responden yang menggantikan peran suami sebagai sumber pendapatan utama bagi keluarga. Selain itu, sebanyak 58% responden memiliki pekerjaan lain selain menjalankan usaha yang dibiayai dengan DPM. Namun, hanya sejumlah 14% orang menyatakan bahwa penghasilan responden sendiri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil ini menunjukkan perempuan-perempuan kini memiliki kesempatan luas untuk dapat berkarya dan mengembangkan diri diberbagai bidang tidak hanya terbatas mengurus urusan domestik (rumah) saja. Hal ini apabila didukung oleh berbagai pihak terutama pemerintah akan dapat mendorong perempuan untuk dapat mengembangkan perannya keberbagai sektor lain.

b. Perani Sebagai Ibu Rumah Tangga

Persepsi responden mengenai menjalankan usaha menyita waktu untuk keluarga hanya 2 orang responden yang menyatakan setuju. Artinya waktu untuk mengurus usaha dan keluarga terbagi dengan seimbang.

Kewajiban utama ibu rumah tangga adalah mengurus keluarga. Meskipun demikian sebanyak 14% orang responden menyatakan bahwa ada keluhan dari keluarga karena responden terlalu menghabiskan banyak waktu untuk mengurus usaha. Meski waktu sudah dibagi berdasarkan prioritas. Masih adanya keluhan dari keluarga menandakan besarnya peran seorang perempuan dalam keluarga, hingga ketidakhadirannya akan meninggalkan kekosongan.

Membagi waktu antara mengelola usaha dan mengurus keluarga tidak menjadi masalah. Keduanya bisa sejalan sesuai porsinya, dan keluarga tetap menjadi prioritas. Disamping sibuk mengelola usaha, keluarga tetap dapat terurus dengan baik. Sehingga tidak ada keluhan dari anggota keluarga.

c. Peran Sebagai Anggota Kelompok UPPKS dan UP2K

1) Kelompok dan kemajuan usaha

Kelompok memiliki kontribusi terhadap kemajuan usaha, antar sesama anggota dalam kelompok penerima DPM dapat saling berbagi dalam mencari solusi dari permasalahan yang dialami dalam mengelola usaha. Sehingga masalah lebih mudah diselesaikan.

2) Kelompok dan kehidupan sosial

Responden menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa mereka berperan aktif dalam kelompok UPPKS/UP2K. Dalam kelompok antar anggota saling berbagi dalam mengatasi permasalahan mengenai keluarga maupun lingkungan.

d. Waktu yang dihabiskan untuk Usaha dan Kelompok

Setiap minggunya responden rata-rata menghabiskan waktu untuk mengelola usaha sebanyak 33,6 jam, menghabiskan waktu untuk berkegiatan dalam kelompok sebanyak 2,5 jam. Dari total 168 jam/minggu, maka sisa waktu responden adalah 131,9 jam.

Alokasi waktu responden selama satu minggu yaitu 168 jam, sebanyak 20% untuk mengelola usaha, 1,49% untuk berkegiatan dalam kelompok, dan sisanya 78,51% untuk keluarga, diri sendiri dan lain-lain. Porsi waktu terbesar diberikan untuk keluarga, kemudian usaha, selanjutnya untuk kelompok.

Beberapa kegiatan rutin yang diikuti responden dalam kelompok UPPKS/UP2K pertemuan rutin yang biasanya diisi dengan arisan dan pengumpulan iuran pengembalian pinjaman. Kegiatan lainnya ialah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh PLKB. Setiap kelompok setidaknya mengadakan pertemuan setiap satu bulan sekali.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan, landasan teori, hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggota Kelompok UPPKS dan UP2K merasakan manfaat dari pinjaman DPM. Pada dasarnya pengusaha memang membutuhkan tambahan modal untuk memajukan usaha mereka. Setelah menerima DPM, usaha penerima mengalami perkembangan.
2. Perkembangan usaha yang dirasakan meliputi, peningkatan modal usaha sebesar 169,59%, peningkatan tenaga kerja sebesar 41,38%, peningkatan pendapatan sebesar 115%, peningkatan asset yang dimiliki sebesar 80%, serta peningkatan tabungan sebesar 164%. Secara keseluruhan dapat ditarik rata-rata perkembangan usaha yang dialami penerima DPM adalah sebesar 113,99%.
3. Beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh penerima DPM, antara lain:
 - a. Kendala pencairan dana, yakni terkait dengan prosedur pembuatan proposal pengajuan DPM.
 - b. Kendala dalam pemanfaatan dana, yakni jumlah pinjaman yang belum mencukupi dan masih kurangnya pengetahuan manajerial dan keuangan usaha.

- c. Kendala dalam pengembalian dana, dari sisi kelompok disebabkan oleh adanya anggota yang terlambat membayarkan angsuran.
- 4. Selain sebagai pengusaha, pelaku usaha dari kelompok UPPKS/UP2K merupakan ibu rumah tangga yang tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Waktu untuk keluarga, usaha dan kelompok dapat terdistribusi secara seimbang dengan prioritas utama tetap pada keluarga.

B. Keterbatasan Penelitian

- 1. Fokus pembahasan penelitian ini hanya individu-individu penerima DPM. Sisi kelompok sebagai wadah dan penerima DPM belum terkaji secara mendalam.
- 2. Penelitian ini melakukan perhitungan manfaat yang dirasakan penerima DPM secara umum, sehingga tidak ada pembedaan kajian antara yang penerima DPM yang baru menerima sebanyak satu periode dan yang lebih dari satu periode.

C. Saran Penelitian

- 1. Program DPM sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil. Sehingga program ini perlu dipertahankan, bahkan diperbesar skalanya baik dari sisi jumlah dana maupun jumlah penerima.
- 2. Pemantauan rutin hendaknya dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pengembalian dana, tetapi juga memantau keberlangsungan usaha penerima. Hal ini, bisa dilakukan dengan mengoptimalkan dinas-dinas terkait.

3. Pemantauan perkembangan perlu dilakukan secara berkelanjutan baik secara langsung maupun melalui penyusunan laporan dari penerima DPM. Dengan menulis laporan perkembangan usaha, maka penerima harus membuat pembukuan yang sekaligus akan membantu dalam mengelola usaha. Selain itu, melalui hasil pemantauan ini pihak KP3M dan dinas terkait dapat menjadikannya sebagai bahan rujukan evaluasi serta rujukan untuk merumuskan program pendukung yang sesuai dengan kondisi penerima DPM.
4. Instansi terkait perlu memperbanyak program pendampingan dan pelatihan terutama yang berkaitan dengan kreativitas dan pengelolaan usaha karena sangat bermanfaat bagi penerima DPM. Berikut ini beberapa program yang diinginkan oleh responden:
 - a. Pendampingan rutin bagi pengusaha sebagai wadah *sharing* antara pengusaha dan petugas.
 - b. Pelatihan mengenai manajemen, akuntansi, dan pemasaran. Terutama mengenai regulasi dan dokumen-dokumen terkait yang diperlukan untuk melakukan transaksi penjualan dalam skal besar.
 - c. Pelatihan aneka ketrampilan kreativitas seperti kerajinan dan memasak untuk meningkatkan kemampuan SDM dan jika juga daapat menjadi inspirasi untuk usaha.
5. Keberadaan kelompok dapat lebih dioptimalkan peran dan kontribusinya tidak hanya sebagai wadah, tetapi juga dapat menjadi motivator baik bagi anggota maupun non anggota untuk

memberdayakan diri dan berani memulai usaha serta membangun budaya yang positif di kalangan anggota terkait dengan pendisiplinan penunaian kewajiban pada pemberi DPM. Lebih dari itu kedepannya kelompok dapat memfungsikan diri untuk mengelola dana bergulir sendiri, tidak hanya dana dari KP3M saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Suhardono. 2001. *Refleksi Metodologi Riset – Panorama Survey*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gusmantiana. 2003. Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi dan Karakter Bangsa, diakses dari: <http://www.kompasiana.com> pada tanggal 17 Maret 2014, pukul 15.30
- Lincoln Arsyad. 1997. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Laporan Pengelolaan Dana Penguatan Modal Kabupaten Sleman Semester II Tahun 2013
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mudrajat Kuncoro. 2003. *Metode riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mohamad Anugrah H. 2009. *Kajian Partisipasi Penerima Manfaat Dana Bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang*. Tesis. Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/23676/1/MOHAMAD_ANUGRAH_HAMONANGAN.pdf pada April 2014.
- Mulyadi Nitisusastro. 2012. *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.
- Parsiyo, Indikator Keberhasilan Pembangunan, diakses dari: <http://ppmkp.Bpp>

sdmp.deptan.go.id/index.php/artikel/kepemimpinan-dan-manajemen/75-indikator-keberhasilan-pembangunan pada tanggal 13 Juni 2014, pukul 17.30

Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014

Rika Puspita Sari. 2011. *Peranan bantuan program penguatan modal usaha terhadap usaha pengolahan pisang pada kelompok wanita tani (KWT) Maju Bersama di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi. Diakses dari http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/4031/T2_092011006_Daftar%20Pustaka.pdf?sequence=9 pada April 2014.

Sadono Sukirno. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suherman Rosyidi. 2011. *Pengantar Teori Ekonomi–Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Yetty Oktarina. 2009. *Dampak Dana Penguatan Modal untuk Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Padi Sawah di Desa Gunung Kuripan Kec. Pengandonan Kabupaten OKU*. Jurnal. Diakses dari <http://agronobisunbara.files.wordpress.com/2012/11/11-hal-78-88-yetty.pdf> pada April 2014

Zulkarnain. 2003. *Membangun Ekonomi Rakyat—Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1
Daftar Responden

No.	Nama	Alamat
1	Sufia Mubarika	Perum Sleman Permai 2 blok K.6, Tlogoadi, Mlati, Sleman
2	Sagita Sapta Rina	Perum Sleman Permai 2 blok K.2, Tlogoadi, Mlati, Sleman
3	Theresia Wiwik	Gancohan V, Sidomulyo, Godean, Sleman
4	Rumini Setianingsih	Nglengking, Sendangrejo, Sleman
5	Widayati	Nglengking, Sendangrejo, Sleman
6	Sri Budiayati	Ds Pojok RT01/15, Harjobinangun, Pakem, Sleman
7	Amin Rahayuningsih	Warak RT 04/10, Sumberadi, Mlati, Sleman
8	Sri Nurgrayanti	Godean I, Sidoagung, Godean
9	Sri Hardaningsih	Kurahan IV, Margdadi, Seyegan, Sleman
10	Angela Meria Juliatin	Warak Kidul RT04/10, Sumberadi, Mlati, Sleman
11	Sri Mulyaningsih	Nargobinangun, Pakem
12	Tuswanti	Tegalsari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman
13	Erma Dwi Nuryani	Randusari, RT 02 RW 01 Argomulyo, Cangkringan, Sleman
14	S Sulistyarini	Sawahan, Pandewoharjo
15	Sri Wahyuningsih	Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman
16	Suparmi	Kandangari, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman
17	Eni Widarti	Kemasan, Sendang Tirto, Berbah, Sleman
18	Krisnawati	Bedingin Wetan, Sumberadi, Mlati, Sleman
19	Siti Umiyati	Tegalrejo, Taman Martani, Kalasan
20	Wahyu Lestariningsih	Jitar, Sumberarum, Moyudan, Sleman
21	Paryanti	Rogobangsan, Bimomartani, Ngemplak, sleman
22	Retno Sari Utami	Kalibulus, Binomartani, Ngemplak
23	Sri Suhartini	Teplok, Argomulyo, Cangkringan
24	Siti Aliyati	Sangonan, sidorejo, Godean
25	Suginah	Minggir
26	Mariati	Margodadi, Seyegan
27	Wahyu Widayati	Padasan, Pakem Binangun
28	Yuti Widarsih	Wulungan Wetan
29	Iis Sunarsih	Malangrejo, wedomartani, Ngemplak, Sleman
30	J Sugimah	Gowok, Pandowoharjo, Sleman
31	Yuliana Suryati	Kaliduren, Moyudan, Sleman
32	Bu Suhartini	Karanng kalasan, Tirtomartani
33	Yulita Titik S. A	Purwomartani, kalasan
34	Muslihah	Harjobinangun, Pakem
35	Esti Widarsih	Harjobinangun, Pakem

Lanjutan

No.	Nama	Alamat
36	wahyuningsih	Harjobinangun, Pakem
37	Sri Andayani	Kemasan, Sendang Tirto, Berbah, Sleman
38	Mugiyati	Kepitu, Trimulyo, Sleman
39	Supriyana Dwi Lestari	Mergono, Tambakrejo, Tempel
40	Sutiyem	Trimulyo, Sleman
41	Subaryanti	Karangberan, Margodadi, Sleman
42	Listyaningsih	Cebongan Kidul, Tlogodadi, Mlati, Sleman
43	Narti	Tempel
44	Ragil Surtiyani	Cawan, Widodomartani, Ngemplak, Sleman
45	Sri Wahyuni	Wedomartani, Ngemplak, Sleman
46	Sumarni	Ngemplak, Sleman
47	Suharni	Ngaglik, Sleman
48	Nur Yanti	Tempel, Sleman
49	Sri saptini	Godean, Sleman
50	Th Kristiningsih	Wonokerto, Turi, Sleman

Lampiran 2

INSTRUMEN PENELITIAN

Petunjuk: Lengkapi pertanyaan isian dengan mengisi titik-titik yang tersedia dan untuk pertanyaan pilihan dengan melingkari pilihan jawaban yang sesuai

A. KARAKTERISTIK UMUM RESPONDEN

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin : (1) Laki-laki (2) Perempuan
4. Umur :
5. Pendidikan Tertinggi : (1) Tidak lulus SD (2) SD
(3) SMP (4) SMA/SMK (6) D-1/D-2/D-3
(7) S-1 (8) Lainnya:
6. Status pernikahan : (1) Menikah
(2) Belum menikah (3) Janda/Duda
7. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan :
8. Ada bantuan anggota keluarga dalam menjalankan usaha: (1) YA (2) TIDAK
9. Bila YA jumlah anggota keluarga yang terlibat sebagai tenaga kerja :

B. KARAKTERISTIK UMUM USAHA

1. Bidang Usaha/Kelompok Usaha :
2. Tahun berdirinya usaha Bapak/Ibu :
3. Bila usaha Bapak /Ibu tergabung dalam kelompok usaha:
 - a. kedudukan Bapak/Ibu dalam kelompok adalah:
 - (1) Pengurus Kelompok (2) Anggota Kelompok
 - b. Tahun berdirinya kelompok usaha:
 - c. Tahun Bapak/Ibu tergabung dalam kelompok usaha:
 - d. Jumlah anggota kelompok ada awal berdirinya:
 - e. Jumlah anggota kelompok saat ini:
4. Sumber modal awal usaha : (1) Tabungan pribadi

- (2) Pinjaman dari teman
- (3) Pinjaman dari saudara
- (4) Pinjaman dari lembaga kredit/keuangan
- (5) Sumber lainnya:.....

C. KARAKTERISTIK DANA PINJAMAN MODAL DARI KP3M

1. Besarnya pinjaman yang kelompok Bapak/Ibu terima: Rp.....
2. Besarnya pinjaman yang Bapak/Ibu terima: Rp.....
3. Apakah jumlah pinjaman tersebut mencukupi ? (1). YA
(2). TIDAK
4. Pinjaman DPM Bapak/Ibu gunakan untuk:
 - (1). Menambah modal kerja
 - (2). Membeli asset
 - (3). Lainnya
5. Sudah berapa kali Bapak/Ibu memperoleh DPM dari KP3M? Jawab:
..... kali
6. Apakah masa tenggang (*grace period*) tersebut cukup layak dan memungkinkan Bapak/Ibu mampu membayar angsuran dengan menggunakan keuntungan usaha?
(1) YA (2). TIDAK
7. Lama periode pinjaman yang Bpk/Ibu lakukan:
8. Periode pembayaran angsuran pinjaman: (1) Harian (3) Bulanan
(2) Mingguan (4) Lainnya
.....
9. Besarnya angsuran yang Bapak/Ibu bayarkan per periode: Rp.....
10. Jumlah angsuran yang harus Bapak/Ibu
lakukan:.....kali
11. Menurut Bapak/Ibu besar angsuran yang dibayarkan:
(1) Ringan (2) sesuai dengan kemampuan (3) berat
12. Jumlah angsuran yang sudah Bapak/Ibu
lakukan:.....kali

13. Apakah Bapak/Ibu membayar angsuran pinjaman melalui kelompok tepat waktu?
(1) YA (2) TIDAK
14. Apakah Bapak/Ibu menerima bukti pembayaran (misalnya kuitansi) angsuran pinjaman dari kelompok?
(1) YA (2) TIDAK
15. Apakah Kelompok Bapak/Ibu membayar angsuran pinjaman tepat waktu pada KP3M?
(1) YA (2) TIDAK
16. Bila Bapak/Ibu menjawab TIDAK, jelaskan apa alasannya:
17. Apakah pinjaman DPM ini mempersyaratkan adanya agunan? (1) YA
(2) TIDAK
18. Bila Bpk/Ibu menjawab YA, jenis agunan yang Bapak/Ibu gunakan
:.....
19. Apakah menurut Bapak/Ibu kontribusi (bunga) yang harus Bapak Ibu bayarkan terlalu tinggi?
(1) YA (2) TIDAK
20. Jika jawaban Bapak/Ibu “YA”, menurut Bapak/Ibu berapa kontribusi (bunga) yang sesuai dengan hasil usaha Bapak/Ibu? Jawab: % per
21. Apakah Bapak/Ibu juga memperoleh pinjaman dari lembaga selain KP3M
(1) YA (2) TIDAK
Jika jawaban Bapak/Ibu “Ya”
a. Nama lembaga lain pemberi kredit:
b. Berapa kontribusi (bunga) yang Bapak/Ibu bayarkan:% per
.....
22. Pengeluaran lainyang sering Bapak/Ibu lakukan dengan menggunakan DPM yang dapat menghalangi/mengganggu pemanfaatan pinjaman Bapak/Ibu untuk tujuan produktif: (jawaban bisa lebih dari satu)

- (1) Tidak ada
- (2) Membayar biaya sekolah anak
- (3) Biaya berobat
- (4) Pengeluaran konsumsi sehari-hari
- (5) Pengeluaran untuk kebutuhan social kemasyarakatan (nyumbang, membantu saudara, dll)
- (6) Membayar utang
- (7) Lainnya:.....

D. PERBANDINGAN KARAKTERISTIK USAHA SEBELUM DAN SETELAH MENDAPAT DPM DARI KP3M

No.	Indikator	Sebelum Mendapat DPM	Setelah Mendapat DPM
1	Modal Usaha	Rp.	Rp.
2	Jumlah Tenaga Kerja		
3	Rata-rata Pendapatan/.....	Rp.	Rp.
4	Nilai asset yang dimiliki	Rp.	Rp.
5	Nilai tabungan yang dimiliki	Rp.	Rp.

E. INFORMASI TERKAIT DPM dan KP3M

1. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai DPM dari KP3M?
 - (1) Teman/tetangga
 - (2) Staff KP3M
 - (3) Leaflet / selebaran / buletin dari KP3M/Pemda Sleman
 - (4) Pengumuman dari media masa (misalnya radio, tv, surat kabar)
 - (5) Lainnya:.....
2. Sebelum Bapak/Ibu memperoleh DPM apakah ada petugas dari instansi terkait yang melakukan survey kelayakan usaha Bpk/Ibu? (1). YA
(2). TIDAK
3. Sebelum Bapak/Ibu memperoleh DPM apakah ada petugas dari KP3M yang melakukan verifikasi atas hasil survey kelayakan usaha Bapak/Ibu?
 - (1). YA
 - (2). TIDAK

4. Setelah Bapak/Ibu memperoleh DPM apakah ada petugas dari instansi terkait yang secara kontinyu memantau usaha Bapak/Ibu?
(1). YA (..... kali /tahun) (2). TIDAK
5. Apakah KP3M memberikan bantuan selain berbentuk DPM kepada Bapak/Ibu?
(1). YA (2). TIDAK
6. Jika “YA” apa bentuk layanan yang diberikan?
(1). Konsultasi Usaha (2). Pelatihan Manajemen Usaha
(3). Bantuan Pemasaran (4). Pendampingan Usaha
(5). Lainnya:
7. Berkaitan dengan pengelolaan usaha Bapak/Ibu, layanan apakah yang sebenarnya Bapak/Ibu perlukan?
Jawab:.....
8. Untuk Bapak/Ibu yang pernah tidak bisa membayar angsuran tepat waktu; apakah ada petugas dari KP3M yang menanyakan/mencari tahu penyebabnya?
(1). YA (2). TIDAK
9. Untuk Bapak/Ibu yang bisa membayar angsuran tepat waktu, apa bentuk penghargaan dari KP3M yang diberikan kepada Bapak/Ibu?
Jawab:
10. Untuk Bapak/Ibu yang bisa membayar angsuran tepat waktu, apa bentuk penghargaan yang sebenarnya Bapak/Ibu inginkan?
Jawab:

F. PERSEPSI RESPONDEN MENGENAI DPM DAN KEMANFAATAN DPM

Berikan penilaian Bapak/Ibu mengenai pernyataan pada table berikut dengan memberi tanda centang (V) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia!

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| (1). Sangat Setuju [SS]; | (2).Setuju [S], |
| (3). Tidak Setuju [TS], | (4). Sangat Tidak Setuju [STS] |

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Pinjaman DPM diberikan tepat di saat saya membutuhkan tambahan modal				
2	Untuk usaha yang saya tekuni, kontribusi pinjaman yang harus saya bayar terlalu tinggi				
3	Untuk usaha yang saya tekuni, jumlah pinjaman DPM yang dicairkan terlalu kecil sehingga tidak cukup bermakna sebagai investasi				
4	Untuk usaha yang saya tekuni, jangka waktu pembayaran pinjaman terlalu pendek untuk dapat menghasilkan keuntungan				
5	Saya membayar angsuran pinjaman DPM dengan menggunakan hasil/keuntungan usaha saya				
6	Saya membayar angsuran pinjaman DPM dari sumber lain (bukan hasil usaha)				
7	Pinjaman DPM meningkatkan kinerja usaha saya				
8	Usaha saya mengalami perkembangan semenjak menerima pinjaman DPM.				
9	Tabungan saya bertambah sebagai hasil pinjaman DPM yang diperoleh.				
10	Saya mampu membayar angsuran tepat waktu.				
11	Menurut saya pinjaman DPM telah berperan/membantu kesuksesan usaha saya				
12	Menurut saya pinjaman DPM telah berperan/membantu peningkatan kesejahteraan keluarga saya				
13	Bila KP3M tidak memberikan DPM maka saya akan kesulitan menjalankan usaha saya				
14	Secara umum pinjaman DPM bermanfaat untuk saya				

G. PERSEPSI RESPONDEN MENGENAI PROSES ADMINISTRATIF

DPM

Berikan penilaian Bapak/Ibu mengenai pernyataan pada table berikut dengan memberi tanda centang (V) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia!

(1). Sangat Setuju [SS];

(2).Setuju [S],

(3). Tidak Setuju [TS],

(4). Sangat Tidak Setuju [STS]

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Informasi mengenai DPM melalui KP3M mudah diperoleh				
2	Semua aturan yang berlaku terkait pinjaman DPM melalui KP3M mudah dipahami				
3	Prosedur pengajuan pinjaman DPM melalui KP3M berbelit-belit				
4	Keputusan KP3M dalam pemberian pinjaman DPM sesuai dengan hasil survey kelayakan usaha				
5	Proses pencairan dana pinjaman yang sudah disetujui mudah dilakukan				
6	Agar DPM yang disalurkan efektif, KP3M perlu melakukan pendampingan usaha bagi pihak penerima				
7	Pembinaan, pendampingan dan pemantauan yang dilakukan KP3M bermanfaat bagi perkembangan usaha				
8	Agar DPM yang disalurkan efektif peminjam perlu membuat laporan penggunaan DPM dan perkembangan usahanya secara berkala kepada KP3M				
9	Pembuatan laporan DPM dan perkembangan usaha secara berkala kepada KP3M sangat merepotkan				
10	Agar DPM yang disalurkan efektif, KP3M perlu memberika sanksi kepada pihak penerima yang tidak tepat waktu membayar angsuran				
11	Sanksi yang selama ini berlaku bila peminjam terlambat membayar angsuran terlalu berat				
12	Penghargaan yang diberikan KP3M bila saya membayar angsuran tepat waktu mendorong saya untuk lebih patuh				

	membayar angsuran.				
--	--------------------	--	--	--	--

H. Sebagai penerima pinjaman DPM, mohon Bapak dan Ibu bisa memberikan komentar mengenai kesulitan dalam pengelolaan pinjaman DPM atau usulan/saran berkaitan dengan program pemberian pinjaman DPM untuk perbaikan program ini ke depan.

1. Kesulitan dalam pengelolaan DPM (bisa lebih dari 1) :

.....

2. Saran (bisa lebih dari satu):

.....

PETUNJUK PENGISIAN *berilah tanda centang (√) pada kolom pilihan SS/S/TS/STS yang sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang anda rasakan*					
No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Saya adalah satu-satunya yang memiliki penghasilan dalam keluarga saya (tulang punggung keluarga)				
2	Saya memiliki pekerjaan lain selain usaha yang saya jalankan dengan dana DPM				
3	Penghasilan saya sendiri sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari				
4	Menjalankan usaha menyita waktu saya sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus rumah tangga				
5	Disamping menjalankan usaha, saya tetap menjalankan kewajiban dalam keluarga				
6	Keluarga pernah mengeluh saya terlalu banyak menghabiskan waktu mengurus usaha				
7	Keberadaan kelompok usaha UPPK/UPPKS berkontribusi memajukan usaha yang saya jalankan				
8	Saya berperan aktif dalam kelompok usaha UPPK/UPPKS yang saya ikuti				
9	Melalui kelompok UPPK/UPPKS saya dapat saling berbagi antar sesama anggota dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan usaha saya				
10	Melalui kelompok UPPK/UPPKS saya dapat saling berbagi antar sesama anggota dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan keluarga dan lingkungan				

Petunjuk Pengisian *Tuliskan jawaban pertanyaan di titik-titik kosong yang disediakan*		
1	Waktu rata-rata yang saya habiskan untuk menjalankan/mengurus usaha jam/hari	
2	Waktu rata-rata yang saya habiskan untuk kelompok usaha (UPPK/UPPKS) jam/Minggu	
3	Pengeluaran total keluarga per/bulan	Rp
4	Penghasilan rata-rata SAYA per/bulan Penghasilan rata-rata SUAMI per/bulan	Rp..... Rp.....
5	Kegiatan rutin yang diadakan oleh kelompok usaha (UPPK/UPPKS)	
	No	Jenis Kegiatan (contoh: rapat, arisan, pelatihan, dll)
	1 kali/(minggu/bulan)
	2 kali/(minggu/bulan)
	3 kali/(minggu/bulan)
	4 kali/(minggu/bulan)
	5 kali/(minggu/bulan)

Lampiran 3

Hasil Penelitian

Persepsi Responden Mengenai DPM dan Kemanfaatan DPM

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
4	2	2	2	3	2	4	4	3	3	4	3
4	2	2	2	3	2	4	4	4	4	4	4
4	2	1	1	3	2	3	1	2	1	1	1
3	1	2	2	3	1	4	4	4	4	4	4
3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3
4	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3
4	3	2	3	4	2	4	4	4	4	4	4
4	2	2	2	3	2	4	3	3	4	4	3
3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4
4	2	3	2	4	2	4	4	4	4	4	4
3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3
3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3
4	4	3	4	3	2	4	4	3	3	3	4
3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3
4	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3
3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3
4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3
3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
3	2	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3
4	1	3	4	2	3	4	4	4	3	3	3
4	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
4	1	2	2	3	2	3	4	3	3	3	4
4	1	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4
4	2	3	2	3	2	4	3	3	3	3	2
4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	2	4	3	3	4	3	4
4	2	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4
3	2	2	2	3	3	2	4	4	3	3	3
3	2	1	2	4	3	3	3	3	3	4	3

3	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3
4	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3
4	1	2	2	3	3	4	4	3	3	3	3
3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3
4	2	3	2	4	2	4	4	2	4	4	4
4	2	3	2	3	2	4	3	3	3	4	4
4	2	3	2	4	2	4	4	2	4	4	3
3	2	2	2	4	2	4	4	3	3	3	3
4	1	2	2	3	2	4	3	3	3	3	3
4	3	3	4	3	1	3	3	3	3	3	3
4	2	3	2	3	2	3	3	2	4	3	3
4	1	2	2	3	2	4	3	3	3	3	3
3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3
4	2	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3
4	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
4	2	3	2	4	1	4	4	4	3	4	4
4	2	3	2	3	2	3	4	4	3	4	3

Persepsi Responden Mengenai Proses Administrasi DPM

G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12
3	3	2	3	3	4	4	4	2	3	2	4
4	4	2	3	3	4	4	4	2	4	2	4
1	4	1	2	3	1	1	1	4	3	1	1
4	4	2	3	4	3	3	3	2	3	3	3
3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	4
3	3	2	3	3	3	4	3	2	3	2	3
3	3	2	3	3	3	3	3	2	4	2	3
4	4	2	3	4	3	4	4	2	4	3	4
3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	1	4	4	4	4	1	2	2	2	3
4	4	2	2	4	4	4	4	2	2	2	4
3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3
3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3
3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4
3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3
3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	4
3	3	2	3	4	4	4	3	2	3	2	4

3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3
3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3
3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2
4	4	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3
3	3	2	3	3	3	3	3	2	4	3	3
3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
3	3	2	3	3	4	4	4	2	3	2	3
4	4	2	4	4	3	3	3	2	3	2	3
3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	4
4	4	1	3	4	4	3	4	1	4	1	4
4	3	1	3	4	3	3	3	2	1	2	3
4	3	2	3	4	3	4	3	2	4	2	4
3	3	2	3	3	4	4	4	2	4	2	4
4	4	2	3	4	4	3	4	2	4	4	4
4	3	2	3	3	4	3	3	2	3	2	4
4	4	2	1	4	4	4	3	3	4	2	4
3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3
3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3
3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3
3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3
2	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3
3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3
2	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3
4	3	2	2	3	3	3	4	2	2	2	4
3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3
4	4	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3
2	3	2	3	3	4	4	3	2	3	2	4
3	3	2	2	4	3	3	3	2	3	2	4
3	3	2	3	3	4	4	3	2	3	2	4
3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3
4	4	2	3	4	4	4	3	2	3	2	4
4	4	2	3	4	3	3	3	1	3	2	3
4	3	1	1	4	3	4	1	1	1	2	3

**Persepsi Responden Mengenai Peran Responden dalam Kegiatan Ekonomi
dan Keluarga**

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	2	2	4	2	4	4	4	4
2	2	4	3	2	4	2	4	4	4	4
3	3	3	1	1	1	1	1	4	3	4
4	1	2	2	2	4	1	4	4	4	2
5	1	2	2	1	4	2	3	3	3	3
6	2	2	2	2	4	2	4	3	4	3
7	1	3	2	1	3	1	3	3	3	3
8	2	3	2	2	4	2	4	4	4	4
9	2	2	1	1	4	2	3	4	3	3
10	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2
11	1	2	1	2	4	2	4	4	4	4
12	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3
13	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2
14	3	3	2	2	4	2	3	3	3	3
15	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3
16	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3
17	2	3	2	2	4	1	4	4	4	4
18	2	3	2	2	3	2	3	3	3	2
19	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3
20	2	3	2	1	4	2	3	3	3	3
21	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3
22	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3
23	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3
24	2	4	4	2	3	2	3	3	3	3
25	2	3	2	2	4	2	3	3	3	3
26	1	2	2	2	3	2	3	3	3	3
27	1	4	1	1	4	1	3	3	3	3
28	2	2	2	2	3	4	3	3	3	3

29	1	3	1	2	4	2	3	3	3	3
30	4	3	2	2	4	2	3	4	4	3
31	2	3	2	1	4	1	4	4	4	4
32	3	4	4	3		3	4			
33	2	2	2	2	4	2	3	3	3	3
34	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3
35	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3
36	3	3	3		2	3	2	1	2	2
37	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3
38	2	2	2	2	4	2	3	3	3	2
39	2	2	2	2	3	3	3	3	4	2
40	4	3	2	2	3	2	3	3	3	2
41	2	2	2	1	4	2	3	3	4	3
42	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
43	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3
44	1	3	1	2	4	2	3	3	3	3
45	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3
46	2	2	2	2	3	2	3	2	3	3
47	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3
48	1	2	2	2	4	2	3	3	3	3
49	2	3	3	1	4	2	4	4	4	3
50	2	3	2	2	4	2	3	3	3	3

Perubahan Modal Usaha

No	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Pertambahan (Rp)	Rata-rata Sebelum (Rp)	Rata-rata Sesudah (Rp)	Prosentase (%)
1	500.000	2.000.000	1.500.000	1.910.426	3.323.191	300,00
2	500.000	2.000.000	1.500.000	1.910.426	3.323.191	300,00
3	2.000.000	5.000.000	3.000.000	1.910.426	3.323.191	150,00
4	500.000	1.000.000	500.000	1.910.426	3.323.191	100,00
5	1.000.000	1.500.000	500.000	1.910.426	3.323.191	50,00
6	400.000	1.400.000	1.000.000	1.910.426	3.323.191	250,00
7	5.000.000	6.000.000	1.000.000	1.910.426	3.323.191	20,00
8	3.000.000	5.000.000	2.000.000	1.910.426	3.323.191	66,67
9	500.000	1.000.000	500.000	1.910.426	3.323.191	100,00
10	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.910.426	3.323.191	100,00
11	500.000	1.000.000	500.000	1.910.426	3.323.191	100,00
12	5.000.000	6.000.000	1.000.000	1.910.426	3.323.191	20,00
13	2.000.000	5.000.000	3.000.000	1.910.426	3.323.191	150,00
14	10.000.000	15.000.000	5.000.000	1.910.426	3.323.191	50,00
15	300.000	1.300.000	1.000.000	1.910.426	3.323.191	333,33
16	500.000	3.000.000	2.500.000	1.910.426	3.323.191	500,00
17	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.910.426	3.323.191	100,00
18	500.000	2.000.000	1.500.000	1.910.426	3.323.191	300,00
19	10.000.000	12.000.000	2.000.000	1.910.426	3.323.191	20,00
20	1.000.000	1.500.000	500.000	1.910.426	3.323.191	50,00
21	1.000.000	1.500.000	500.000	1.910.426	3.323.191	50,00
22	300.000	1.000.000	700.000	1.910.426	3.323.191	233,33
23	500.000	1.000.000	500.000	1.910.426	3.323.191	100
24	5.000.000	5.000.000	0	1.910.426	3.323.191	0

25	90.000	1.090.000	1.000.000	1.910.426	3.323.191	1111,11
26	500.000	1.000.000	500.000	1.910.426	3.323.191	100,00
27	500.000	2.000.000	1.500.000	1.910.426	3.323.191	300,00
28	250.000	400.000	150.000	1.910.426	3.323.191	60,00
29	100.000	400.000	300.000	1.910.426	3.323.191	300,00
30	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.910.426	3.323.191	100,00
31	500.000	1.000.000	500.000	1.910.426	3.323.191	100,00
32	500.000	1.000.000	500.000	1.910.426	3.323.191	100,00
33	300.000	1.000.000	700.000	1.910.426	3.323.191	233,33
34	500.000	4.500.000	4.000.000	1.910.426	3.323.191	800,00
35	1.000.000	1.100.000	100.000	1.910.426	3.323.191	10,00
36	1.000.000	1.500.000	500.000	1.910.426	3.323.191	50,00
37	700.000	750.000	50.000	1.910.426	3.323.191	7,14
38	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.910.426	3.323.191	100,00
39	1.000.000	4.500.000	3.500.000	1.910.426	3.323.191	350,00
40	400.000	750.000	350.000	1.910.426	3.323.191	87,50
41	6.000.000	8.000.000	2.000.000	1.910.426	3.323.191	33,33
42	10.000.000	11.000.000	1.000.000	1.910.426	3.323.191	10,00
43	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.910.426	3.323.191	100,00
44	4.650.000	16.000.000	11.350.000	1.910.426	3.323.191	244,09
45	2.000.000	3.000.000	1.000.000	1.910.426	3.323.191	50,00
46	4.500.000	6.500.000	2.000.000	1.910.426	3.323.191	44,44
47	300.000	500.000	200.000	1.910.426	3.323.191	66,67
Rata-rata			1.355.102,04	Rata-rata		169,59

Perubahan Tenaga Kerja

No	Sebelum	Sesudah	Pertambahan	Rata-rata Sebelum	Rata-rata Sesudah	Prosentase (%)
1	1	2	1	2	3	100
2	1	2	1	2	3	100
3	2	2	0	2	3	0
4	2	2	0	2	3	0
5	1	1	0	2	3	0
6	2	7	5	2	3	250
7	3	3	0	2	3	0
8	2	2	0	2	3	0
9	2	2	0	2	3	0
10	1	2	1	2	3	100
11	1	3	2	2	3	200
12	4	4	0	2	3	0
13	0	2	2	2	3	
14	3	3	0	2	3	0
15	5	5	0	2	3	0
16	1	1	0	2	3	0
17	2	2	0	2	3	0
18	1	1	0	2	3	0
19	1	1	0	2	3	0
20	2	2	0	2	3	0
21	2	4	2	2	3	100
22	2	2	0	2	3	0
23	1	1	0	2	3	0
24	1	1	0	2	3	0
25	2	5	3	2	3	150
26	1	2	1	2	3	100
27	2	2	0	2	3	0
28	2	3	1	2	3	50
29	5	5	0	2	3	0
30	2	3	1	2	3	50
Rata-rata			0,67	Rata-rata		41,38

Perubahan Pendapatan

No	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Pertambahan (Rp)	Rata-rata Sebelum (Rp)	Rata-rata Sesudah (Rp)	Prosentase (%)
1	500.000	1.000.000	500.000	680.000	1.404.762	100
2	500.000	1.000.000	500.000	680.000	1.404.762	100
3	1.220.000	1.500.000	280.000	680.000	1.404.762	22,95
4	600.000	800.000	200.000	680.000	1.404.762	33,33
5	800.000	1.200.000	400.000	680.000	1.404.762	50
6	2.500.000	3.000.000	500.000	680.000	1.404.762	20
7	1.500.000	2.200.000	700.000	680.000	1.404.762	46,67
8	250.000	500.000	250.000	680.000	1.404.762	100
9	100.000	1.000.000	900.000	680.000	1.404.762	900
10	100.000	150.000	50.000	680.000	1.404.762	50
11	500.000	800.000	300.000	680.000	1.404.762	60
12	500.000	750.000	250.000	680.000	1.404.762	50
13	150.000	300.000	150.000	680.000	1.404.762	100
14	70.000	150.000	80.000	680.000	1.404.762	114,29
15	400.000	750.000	350.000	680.000	1.404.762	87,50
16	4.000.000	4.200.000	200.000	680.000	1.404.762	5
17	600.000	650.000	50.000	680.000	1.404.762	8,33
18	600.000	650.000	50.000	680.000	1.404.762	8,33
19	1.000.000	2.000.000	1.000.000	680.000	1.404.762	100
20	0	200.000	200.000	680.000	1.404.762	
21	1.500.000	2.200.000	700.000	680.000	1.404.762	46,67
22	0	1.200.000	1.200.000	680.000	1.404.762	
23	600.000	700.000	100.000	680.000	1.404.762	16,67
24	250.000	350.000	100.000	680.000	1.404.762	40
25	120.000	150.000	30.000	680.000	1.404.762	25
26	100.000	300.000	200.000	680.000	1.404.762	200
27	150.000	200.000	50.000	680.000	1.404.762	33,33
28	100.000	250.000	150.000	680.000	1.404.762	150
29	100.000	200.000	100.000	680.000	1.404.762	100
30	0	1.000.000	1.000.000	680.000	1.404.762	
31	750.000	900.000	150.000	680.000	1.404.762	20
32	750.000	900.000	150.000	680.000	1.404.762	20
33	750.000	900.000	150.000	680.000	1.404.762	20
34	1.000.000	1.500.000	500.000	680.000	1.404.762	50
35	400.000	1.050.000	650.000	680.000	1.404.762	162,50
36	500.000	600.000	100.000	680.000	1.404.762	20

37	1.500.000	2.000.000	500.000	680.000	1.404.762	33,33
38	0	4.000.000	4.000.000	680.000	1.404.762	
39	2.000.000	3.000.000	1.000.000	680.000	1.404.762	50
40	200.000	300.000	100.000	680.000	1.404.762	50
41	900.000	13.000.000	12.100.000	680.000	1.404.762	1.344,4
42	1.000.000	1.500.000	500.000	680.000	1.404.762	50
Rata-rata			724.762	Rata-rata		115

Perubahan Asset

No	Sebelum	Sesudah	Pertambahan	Rata-rata Sebelum	Rata-rata Sesudah	Prosentase (%)
1	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.109.615	3.394.231	100
2	1.000.000	2.500.000	1.500.000	2.109.615	3.394.231	150
3	500.000	1.000.000	500.000	2.109.615	3.394.231	100
4	300.000	500.000	200.000	2.109.615	3.394.231	66,67
5	500.000	1.000.000	500.000	2.109.615	3.394.231	100
6	300.000	600.000	300.000	2.109.615	3.394.231	100
7	1.000.000	2.700.000	1.700.000	2.109.615	3.394.231	170
8	0	2.000.000	2.000.000	2.109.615	3.394.231	
9	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.109.615	3.394.231	100
10	1.000.000	3.500.000	2.500.000	2.109.615	3.394.231	250
11	6.000.000	6.000.000	0	2.109.615	3.394.231	0
12	5.000.000	5.000.000	0	2.109.615	3.394.231	0
13	700.000	1.500.000	800.000	2.109.615	3.394.231	114,28
14	1.800.000	2.500.000	700.000	2.109.615	3.394.231	38,89
15	0	6.000.000	6.000.000	2.109.615	3.394.231	
16	500.000	800.000	300.000	2.109.615	3.394.231	60
17	1.500.000	2.500.000	1.000.000	2.109.615	3.394.231	66,67
18	350.000	400.000	50.000	2.109.615	3.394.231	14,28
19	2.500.000	2.500.000	0	2.109.615	3.394.231	0
20	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.109.615	3.394.231	100
21	400.000	750.000	350.000	2.109.615	3.394.231	87,5
22	6.000.000	6.000.000	0	2.109.615	3.394.231	0
23	5.000.000	10.000.000	5.000.000	2.109.615	3.394.231	100
24	500.000	1.000.000	500.000	2.109.615	3.394.231	100
25	2.000.000	3.500.000	1.500.000	2.109.615	3.394.231	75
26	15.000.000	20.000.000	5.000.000	2.109.615	3.394.231	33,33
Rata-rata			1.284.615	Rata-rata		80

Perubahan Tabungan

No	Sebelum	Sesudah	Pertambahan	Rata-rata Sebelum	Rata-rata Sesudah	Prosentase (%)
1	0	1.000.000	1.000.000	364.400	1.482.885	
2	1.000.000	2.500.000	1.500.000	364.400	1.482.885	150
3	1.000.000	1.500.000	500.000	364.400	1.482.885	50
4	500.000	1.000.000	500.000	364.400	1.482.885	100
5	500.000	1.500.000	1.000.000	364.400	1.482.885	200
6	0	500.000	500.000	364.400	1.482.885	
7	0	1.000.000	1.000.000	364.400	1.482.885	
8	0	1.500.000	1.500.000	364.400	1.482.885	
9	100.000	250.000	150.000	364.400	1.482.885	150
10	200.000	1.250.000	1.050.000	364.400	1.482.885	525
11	100.000	200.000	100.000	364.400	1.482.885	100
12	200.000	300.000	100.000	364.400	1.482.885	50
13	0	1.055.000	1.055.000	364.400	1.482.885	
14	0	10.000.000	10.000.000	364.400	1.482.885	
15	200.000	300.000	100.000	364.400	1.482.885	50
16	60.000	200.000	140.000	364.400	1.482.885	233,33
17	50.000	250.000	200.000	364.400	1.482.885	400
18	0	500.000	500.000	364.400	1.482.885	
19	500.000	1.000.000	500.000	364.400	1.482.885	100
20	1.500.000	7.000.000	5.500.000	364.400	1.482.885	366,67
21	500.000	1.500.000	1.000.000	364.400	1.482.885	200
22	100.000	250.000	150.000	364.400	1.482.885	150
23	600.000	1.000.000	400.000	364.400	1.482.885	66,67
24	1.000.000	1.500.000	500.000	364.400	1.482.885	50
25	800.000	1.000.000	200.000	364.400	1.482.885	25
26	200.000	500.000	300.000	364.400	1.482.885	150
Rata-rata			1.132.500	Rata-rata		164